



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERANAN *JIEITAI* (PASUKAN BELA DIRI) DALAM KEAMANAN  
ENERGI JEPANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Humaniora**

**NURLITA WIDYASARI  
0704080388**

**Program Studi Jepang  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia  
Depok, 2008**

**PERANAN *JIEITAI* ( PASUKAN BELA DIRI ) DALAM KEAMANAN  
ENERGI JEPANG**



**SKRIPSI**

**NURLITA WIDYASARI  
0704080388**

**PROGRAM STUDI JEPANG  
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK  
2008**

Skripsi ini telah diujikan pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2008

### PANITIA UJIAN

Ketua

Pembimbing

Jonnie R. Hutabarat, M.A.

Drs. Ferry Rustam, M.Si

Panitera

Pembaca I

Endah H. Wulandari, M.Hum

Ansar Anwar, S.S.

Pembaca II

Endah H. Wulandari, M.Hum

Disahkan pada hari \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ oleh:

Koordinator Program Studi

Dekan

Jonnie R. Hutabarat, M.A.

Dr. Bambang Wibawarta

## UCAPAN TERIMA KASIH

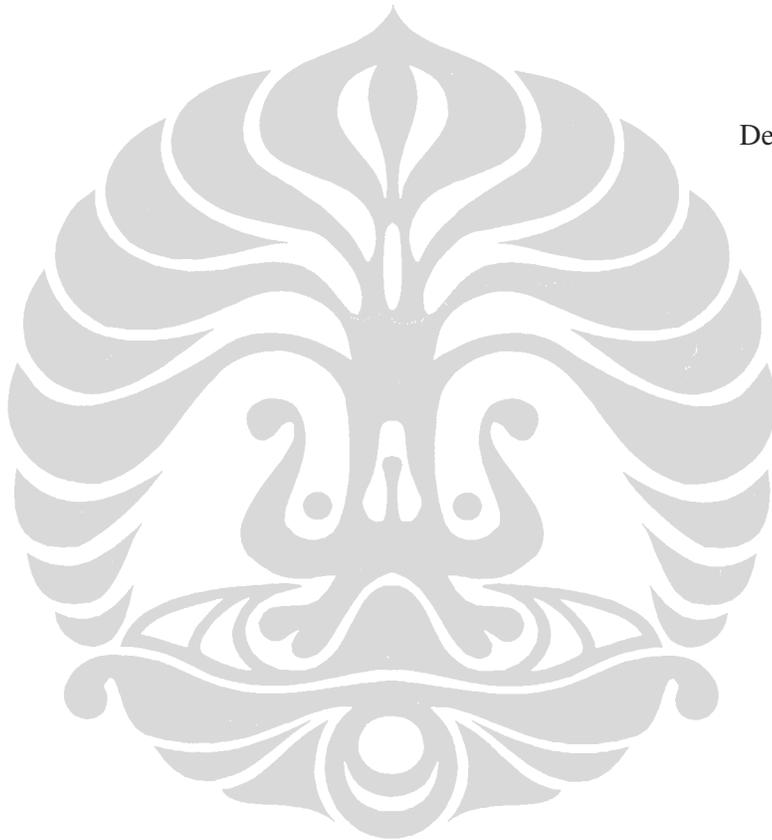
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Jepang pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Ferry Rustam, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, masukan, dan kesabaran dalam mengarahkan penulis untuk penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Jonnie Rasmada Hutabarat, M.A sebagai Koordinator Program Studi Jepang sekaligus Ketua Panitia Ujian yang telah memberikan bantuan kepada penulis, kemudian Ibu Ansar Anwar, S.S dan Ibu Endah H. Wulandari, M.Hum yang telah bersedia menjadi Pembaca, dan memberikan saran yang bermanfaat untuk penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen, para staf pengajar di Program Studi Jepang yang telah mendidik penulis selama menimba ilmu di Universitas Indonesia
4. Papa-Mama tercinta, Kak Nungki, dan Kak Osa yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan baik material maupun moril. Semoga Allah S.W.T meridhai dan menciptakan surga terindah untuk keluarga besarku di dunia dan akhirat, amiin yaRabb.
5. Ide Setio Oetomo, seorang baik hati yang menjadi penyemangat hatiku disaat aku gundah, kecewa, dan bahagia. May Allah S.W.T love u always, amin.
6. Pihak Perpustakaan Japan Foundation, Perpustakaan FIB, dan Perpustakaan CSIS yang membantu penulis memperoleh data yang diperlukan.
7. Sahabat-sahabat kualitatif yang tumbuh bersama penulis: seluruh anak Jepang'04, khususnya Ajeng, Chibi, Ruu, Ely, dan Hana. Kemudian kawan-kawan lain dunia tapi begitu indah: Chee-chee, Adam, dan Satria.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberi semangat, dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah S.W.T berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 14 Juli 2008  
Penulis



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlita Widyasari  
NPM : 0704080388  
Program Studi : Jepang  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Peranan Jieitai (Pasukan Bela Diri) dalam Keamanan Energi Jepang** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

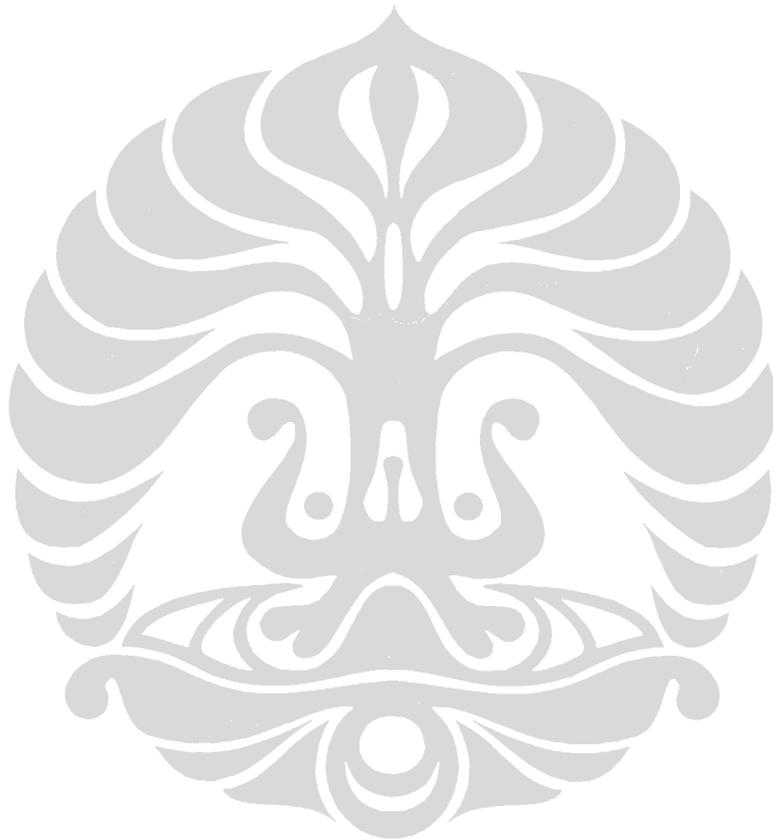
Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 14 Juli 2008  
Yang Menyatakan

( Nurlita Widyasari )

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	5
1.3 Ruang Lingkup .....	6
1.4 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>2. JIEITAI (PASUKAN BELA DIRI) JEPANG .....</b>	<b>8</b>
2.1 Sejarah Pembentukan <i>Jieitai</i> .....	8
2.2 Peran dan Misi <i>Jieitai</i> secara umum .....	10
2.3 <i>Rikujō Jieitai</i> (Pasukan Bela Diri Darat) .....	13
2.4 <i>Kaijō Jieitai</i> (Pasukan Bela Diri Laut) .....	14
2.5 <i>Kūjō Jieitai</i> (Pasukan Bela Diri Udara) .....	16
<b>3. KEAMANAN ENERGI MENURUT JEPANG.....</b>	<b>17</b>
3.1 Krisis Energi bagi Jepang .....	17
3.1.1 Krisis Pertama Energi Minyak Dunia .....	18
3.1.2 Krisis Kedua Energi Minyak Dunia .....	21
3.2 Bentuk Konsep Keamanan Energi bagi Jepang .....	23
3.3 Wilayah-wilayah yang Memerlukan Jaminan Keamanan Energi Menurut Jepang .....	25
3.3.1 Selat Malaka .....	26
3.3.2 Kepulauan Spratly .....	27
3.3.3 Terusan Bashi .....	29
3.4 Langkah-langkah yang diambil Jepang dalam Mengatasi Masalah Keamanannya .....	29
3.4.1 Langkah diplomasi .....	30
3.4.1.1 Dorongan kerja sama penyimpanan cadangan minyak .....	30
3.4.1.2 Penempatan, penyimpanan, penggunaan, pengawasan, dan pendistribusian persediaan energi .....	31
3.4.2 Langkah diversifikasi dan penghematan energi.....	32
3.4.3 Langkah pengawasan jaminan pasokan energi dengan pemberdayaan <i>Jieitai</i> .....	33
<b>4. PERANAN JIEITAI DALAM KEAMANAN ENERGI JEPANG.....</b>	<b>34</b>
4.1 Potensi konflik dengan Negara Cina .....	35
4.2 Peran <i>Jieitai</i> dalam Menghadapi Strategi Militer Cina untuk Menjaga Keamanan Energi Jepang .....	38

4.3 Peran <i>Jieitai</i> dalam Menjaga Pasokan Minyak di beberapa <i>Choke Points</i> dan SLOC ( <i>Sea Lanes of Communication</i> ).....	40
4.3.1 Peran <i>Jieitai</i> di Kepulauan Spratly .....	41
4.3.2 Peran <i>Jieitai</i> di Selat Malaka dan Selat Singapura .....	42
<b>5. KESIMPULAN .....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rute transportasi laut menuju Jepang .....	53
Lampiran 2.	Keadaan Sekitar Jepang .....	54
Lampiran 3.	14 wilayah penempatan 8 divisi dan 6 brigade <i>Rikujō Jieitai</i> (Pasukan Bela Diri Darat) .....	55
Lampiran 4.	5 divisi pertahanan <i>Kaijō Jieitai</i> (Pasukan Bela Diri Laut)..	56
Lampiran 5.	4 wilayah pertahanan <i>Kūjō Jieitai</i> (Pasukan Bela Diri Udara) 57	
Lampiran 6.	Jalur aliran minyak yang menuju Asia .....	58
Lampiran 7.	Jalur laut pasokan minyak Cina .....	59
Lampiran 8.	Jalur laut dan choke points yang penting menurut Jepang di Asia Pasifik .....	60
Lampiran 9.	Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel .....	61
Lampiran 10.	Penggunaan selat-selat oleh masing-masing negara di Asia Timur dan Asia Tenggara .....	62
Lampiran 11.	Helikopter <i>Kūjō Jieitai</i> (Pasukan Bela Diri Udara) yang diperbantukan di Selat Malaka .....	63

## ABSTRAK

Nama : Nurlita Widyasari  
Program studi : Jepang  
Judul : Peranan *Jieitai* (Pasukan Bela Diri) dalam Keamanan Energi Jepang

Penelitian ini berfokus pada peran *Jieitai* (Pasukan Bela Diri), khususnya *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut) dan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara) dalam keamanan energi Jepang. Pentingnya pengamanan energi mulai disadari oleh Pemerintah Jepang setelah Jepang mengalami krisis pertama energi minyak tahun 1973 dan krisis kedua energi minyak tahun 1979. Pengamanan energi khususnya penjagaan pasokan minyak harus dilakukan Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sebagai negara industri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet.

Dari analisis kepustakaan diperoleh bahwa : 1) konsep keamanan energi Jepang adalah proses mengamankan kebutuhan energi yang diperlukan untuk keseharian masyarakat Jepang dan kepentingan ekonomi. Konsep keamanan energi menurut Jepang harus meliputi 3 faktor yang disebut 3 *E's*, yaitu *Economic Growth* (Pertumbuhan Ekonomi), *Environmental Protection* (Perlindungan Lingkungan), dan *Energy Security* (Keamanan Energi). Hal terpenting yang harus dilakukan Jepang adalah menyeimbangkan *Environmental Protection* dan *Energy Security* untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Jepang; 2) Peran *Jieitai* dalam keamanan energi Jepang terus ditingkatkan. Pemerintah Jepang meningkatkan kemampuan *Jieitai*, khususnya *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut) dan *Kūjō Jieitai* (Pasukan bela Diri Udara) untuk menjaga pasokan minyak Jepang mengingat kemungkinan potensi konflik militer dengan Cina terkait keamanan energi. Selain itu, *Jieitai* juga berperan penting dalam menjaga dan mengawasi pasokan minyak yang melewati SLOC (*Sea Lanes of Communication*) maupun beberapa *choke points* penting di kawasan Asia Pasifik, seperti Kepulauan Spratly, Selat Singapura, dan Selat Malaka.

## ABSTRACT

Name : Nurlita Widyasari

Study Program: Japanese Studies

Title : The Roles of *Jieitai* (Self-Defense Force) in Japan's Energy Security

This research focused at *Jieitai*'s roles (Self-Defense Force) in Japan's energy security, especially *Kaijō Jieitai* (Maritime Self-Defense Force) and *Kūjō Jieitai* (Air Self-Defense Force). The importance of energy security was realized by Japan Government after had oil crisis in 1973 and 1979. Energy security, especially the security for Japan's oil custody must be done in order to improve Japan's economic growth as an industrial state.

This research use historical approach with analytical descriptive method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, erudite masterpieces, and sources of internet.

From the analysis it could be concluded that 1) Japan's concept for energy security is a process to secure the energy that use by Japan's public for their lives and economic interest. Japan's energy security has to cover 3 factors that called 3 E's. They are Economic Growth, Environmental Protection, and Energy Security. The important thing that Japan has to do is the balance Environmental Protection with Energy Security to improve Japan's Economic Growth; 2) The Role of *Jieitai* in Japan's energy security has to be improved. Government of Japan improve the ability of *Jieitai*, especially *Kaijō Jieitai* and *Kūjō Jieitai* to take care Japan's oil because there are possibilities for potency of military conflict with China related to Japan's energy security. Moreover, *Jieitai* is also important to take care the oil's flow via SLOC (Sea Lanes of Communication) and choke points in Asia Pacific, like Spratly Islands, Malacca, and Singapore Straits.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jepang merupakan salah satu negara industri di dunia yang mampu bersaing dengan negara industri lainnya, seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat.<sup>1</sup> Persaingan antara negara-negara industri membuat Jepang harus berani menekan biaya produksi barang industrinya. Penekanan biaya produksi tersebut sangat bergantung pada besar kecilnya biaya produksi yang dikeluarkan, harga tenaga kerja, dan harga energi. Dari ke-3 faktor tersebut, harga energi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perindustrian suatu negara.

Sebagai negara industri, Jepang sangatlah membutuhkan energi, khususnya minyak bumi sebagai faktor terpenting agar perindustriannya dapat berjalan dalam jangka panjang. Pada tahun 2005, konsumsi minyak bumi oleh perindustrian Jepang mencapai lebih dari 1 juta b/d (*barrels a day*) minyak bumi, dan ini merupakan 25 % dari total konsumsi minyak bumi di Asia Pasifik.<sup>2</sup>

Ketergantungan Jepang akan minyak bumi dimulai dengan adanya perubahan kebijakan pemakaian bahan bakar untuk keperluan industri dari batu bara ke minyak bumi oleh MITI (*Ministry of International Trade and Industry*) pada tahun 1952. Minyak bumi menjadi sumber energi penting bagi negara-negara industri, tidak terkecuali Jepang, karena tidak ada pengganti minyak atau gas bumi yang sama murahannya, sama praktisnya, mudah diangkut dan mudah disimpan, dan tidak membuat polusi selain minyak bumi.<sup>3</sup> Bahan bakar fosil lain

---

<sup>1</sup> Bachrawi Sanusi. *Minyak bumi mengubah ekonomi dunia, dari Indonesia, OPEC, AS hingga Jepang berkelut dalam energi* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1985), hlm. 190

<sup>2</sup> Kang Wu & Fereidun Fesharaki. *Asia's Energy Future Regional Dynamics & Global Implications* (Hongkong: East-West Center, 2007), hlm. 37

<sup>3</sup> Boulding Kenneth E. *Prospects for Growth, Changing Expectations for the Future*, 1977.

yang berguna dalam dunia industri, seperti halnya batu bara, ternyata kotor, sulit diurus, sulit diambil, tidak praktis, dan kerap menyebarkan polusi.<sup>4</sup>

Di lain pihak, persediaan yang terbatas disertai dengan ketergantungan negara-negara industri pada minyak bumi yang tinggi mengakibatkan kenaikan harga minyak bumi dan kelangkaan pasokan minyak. Terjadinya kenaikan harga minyak bumi yang cenderung terus meningkat akibat ketidakstabilan politik dan keamanan di Timur Tengah, serta peningkatan permintaan minyak dunia di berbagai negara di dunia, khususnya di Cina dan India<sup>5</sup> telah mengakibatkan kekhawatiran pada negara-negara industri yang miskin akan energi minyak, termasuk Jepang. Oleh karena itu, Jepang terus berusaha melakukan kontrak-kontrak dengan berbagai negara di dunia yang dapat menyediakan energi minyak bumi untuk jangka waktu panjang, dan melakukan usaha-usaha dalam menjamin keamanan pasokan energi untuk pertumbuhan industri dan perekonomiannya.

Usaha-usaha yang dilakukan Jepang membuktikan bahwa minyak merupakan faktor yang fundamental dan menentukan keberlangsungan hidup negara dan masyarakatnya.<sup>6</sup> Kondisi ini mendorong suatu negara untuk selalu berusaha memperoleh jaminan akses energi untuk memenuhi semua kebutuhannya. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan konsep keamanan energi atau *energy security*.<sup>7</sup>

Ketika telah terjadi proses pengamanan atas kebutuhan energi, dalam hal ini minyak, maka strategi militer merupakan salah satu strategi untuk memperoleh jaminan akses energi. Menurut Klare, penggunaan strategi militer dalam penjaminan akses energi merupakan faktor yang wajar mengingat:

- 1) strategi keamanan hampir selalu berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer

---

<sup>4</sup> Bachrawi Sanusi. *op.cit.*, hlm.27.

<sup>5</sup> Kang Wu & Fereidun Fesharaki. *op.cit.*, hlm. 35

<sup>6</sup> Fred Cottreel. *Energy and Society: The Relation between Energy, Social Change and Economic Development* (New York: McGraw-Hill, 1955), hlm. 95

<sup>7</sup> Menurut Douglas R. Bohi dan Michael A. Toman dalam bukunya *The Economics of Energy Security* (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996); *energy security* memiliki definisi “pengamanan dan tindakan yang dilakukan akibat terjadinya penurunan kesejahteraan yang mungkin terjadi sebagai implikasi perubahan harga atau persediaan energi.”

- 2) sumber-sumber minyak dunia seluruhnya berada di kawasan yang panas dan rawan konflik: Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah dan sejumlah wilayah di Asia Timur.

Di kawasan Asia Timur, setidaknya ada 5 wilayah yang potensial melahirkan konflik militer terkait keamanan energi, yaitu Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Laut Natuna, Kepulauan Senkaku dan Laut Timor. Bahkan, sejumlah kasus memperlihatkan konflik di wilayah tersebut telah sampai pada konflik militer dimana masing-masing negara mengerahkan kekuatan militernya untuk menghadang lawan, yang seringkali berakhir dengan konfrontasi senjata.<sup>8</sup>

Kemungkinan terjadinya konflik militer akibat keamanan energi di wilayah kawasan Asia Timur menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat perhatian dunia internasional yang dapat berpengaruh pada perekonomian dunia. Terkait dengan masalah keamanan energi, maka negara-negara di kawasan Asia Timur, tidak terkecuali Jepang, menjadikan strategi militer sebagai pilihan untuk menjamin keamanan pasokan energi minyak, dan mengharuskan pengembangan persenjataan sebagai suatu kebutuhan.<sup>9</sup> Hal yang senada juga dilakukan oleh negara Cina.<sup>10</sup>

Jepang sendiri sebagai suatu negara yang kuat perekonomiannya melakukan berbagai kebijakan berkaitan dengan pertahanan dan peran militernya di kawasan Asia Timur.<sup>11</sup> Selain dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara, kebijakan pertahanan juga akan menyokong kebutuhan-kebutuhan perekonomiannya, tidak terkecuali dalam menjamin pasokan keamanan energi, khususnya minyak bumi.

Sebagai negara yang mengandalkan seluruh kebutuhan energinya dari impor, Jepang sangat berkepentingan menjaga akses energinya. Kepentingan ini ditanggapi dengan memperkuat kekuatan militernya. Langkah-langkah yang dilakukan Jepang untuk menjaga akses energinya adalah memperkuat angkatan militernya yang dilakukan melalui berbagai kebijakan pertahanan Jepang.

---

<sup>8</sup> Michael T Klare. *Resource Wars: the New Landscape of Global Conflict* (New York: Owl Books, 2001), hlm.174

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Michael E Brown. *The Rise of China* (London: The MIT Press), hlm.19

<sup>11</sup> *Japan National Defense Program Guideline*, FY 2005

Menurut William T. Tow, kebutuhan Jepang memperkuat kekuatan militernya untuk mengamankan pasokan energi terlihat dari kemungkinan adanya potensi ancaman Cina terhadap Jepang, yaitu:

- 1) Jika terjadi konflik bersenjata antara AS dengan Cina, Jepang akan terlibat di dalam konflik tersebut sebagai akibat dari komitmen kerjasama pertahanan antara Jepang dengan AS.
- 2) Konflik Cina dengan Jepang dapat bersumber dari konflik klaim teritori Kepulauan Senkaku (Diaoyutai)<sup>12</sup> dan perebutan sumber daya laut.
- 3) Kemungkinan Cina melakukan manuver-manuver militer yang mengancam Jepang, misalnya dengan mengganggu jaminan pasokan energi Jepang di Laut Cina Selatan untuk mengamankan kepentingan Cina.

Kemudian, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi ancaman tersebut, berbagai langkah ditempuh Jepang dengan<sup>13</sup>:

- 1) Meningkatkan kemampuan pengisian bahan bakar pesawat di udara (*air-refueling*) yang berguna untuk memperluas wilayah jangkauan operasi militer di kawasan selatan Jepang;
- 2) Melakukan peningkatan kemampuan (*upgrade*) terhadap pangkalan udara yang terletak di pulau-pulau di sekitar Kepulauan Senkaku;
- 3) Memperbesar armada militer angkutan udara;
- 4) Membentuk pasukan reaksi cepat (*Rapid Deployment Force*), dan;

---

<sup>12</sup> Kepulauan Senkaku atau Diaoyutai terletak di sekitar 410 kilometer di Laut Cina Selatan, atau 170 kilometer di barat daya Taiwan. Jepang menemukannya pada tahun 1895 kemudian mengontrolnya hingga pendudukan Amerika Serikat pada 1945. Namun, karena kesulitan mengenai status hukumnya, akibat perebutan atas hak kepulauan ini antara Jepang dan Cina, Amerika secara resmi mengembalikan pulau tersebut kepada Jepang pada 1971. Cina sendiri mengklaim bahwa merekalah yang menemukan pulau itu pada tahun 1372, tetapi berdasarkan Perjanjian Shimonoseki, Cina menyerahkan Kepulauan Senkaku kepada Jepang pada tahun 1895, yang menandai berakhirnya perang Jepang-Cina. Diakses pada tanggal 14 Juni 2008 pukul 22.53 dari [www.korantempo.com/news/2005/4/11/internasional/40.html](http://www.korantempo.com/news/2005/4/11/internasional/40.html) dalam artikel Minyak di Perairan Sengketa.

<sup>13</sup> William T. Tow. 2001. *Subregional security Cooreration in the Third World* (United Stetes: Boulder Lynne Rienner), hlm. 27-43

- 5) Meningkatkan kemampuan (*up-grade*) sistem AEGIS (*Airborne Early warning/Ground environment Integration Segment*)<sup>14</sup> angkatan laut.

Berbagai langkah yang dilakukan Jepang untuk menjaga keamanan pasokan energi dan mengantisipasi kemungkinan adanya potensi ancaman Cina menempatkan *Jieitai* (自衛隊) atau Pasukan Bela Diri khususnya *Kaijō Jieitai* (海上自衛隊) atau Pasukan Bela Diri Laut, dan *Kūjō Jieitai* (空上自衛隊) atau Pasukan Bela Diri Udara pada posisi yang penting. *Jieitai* tidak hanya berperan sebagai Pasukan Bela Diri Jepang tetapi juga melindungi kedaulatan Jepang di bidang sosial, ekonomi, dan politik.<sup>15</sup> Jepang memberdayakan kemampuan *Jieitai* dalam menjaga keamanan pasokan energi minyak bumi di tempat-tempat yang strategis di kawasan Asia Timur.<sup>16</sup>

## 1.2 Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah peranan *Jieitai* khususnya *Kaijō Jieitai* dan *Kūjō Jieitai* dalam keamanan energi Jepang.

Untuk membahas permasalahan tersebut, ada batasan-batasan pembahasan yang jelas, sehingga masalah tersebut dapat dijabarkan pada butir-butir pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk konsep keamanan energi menurut Jepang, khususnya yang menyangkut energi minyak bumi ?
2. Bagaimanakah peranan *Jieitai* khususnya *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut) dan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara) dalam keamanan energi Jepang ?

---

<sup>14</sup> Sistem AEGIS (*Airborne Early warning/Ground environment Integration Segment*) adalah sebuah sistem pertempuran angkatan laut yang memberi peringatan awal, sekaligus dilengkapi dengan sistem radar dan rudal balistik.

<sup>15</sup> Ferry Rustam. *Laporan Penelitian: Hubungan Dinamika Eksternal dengan Pertahanan Jepang setelah Perang* (FSUI, 1996), hlm. 22.

<sup>16</sup> Michael T Klare. *op.cit.*, hlm. 61

### 1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi ini merupakan penulisan hasil penelitian kepustakaan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai peranan *Jieitai* dalam keamanan energi Jepang. Untuk mencapai tujuan itu dipaparkan :

1. Penjelasan tentang bentuk konsep keamanan energi menurut Jepang, terutama yang menyangkut energi minyak bumi.
2. Penjelasan tentang peranan *Jieitai* khususnya *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut) dan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara) dalam keamanan energi Jepang.

### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup data peristiwa yang terjadi pada tahun 1973 hingga tahun 2005 mengenai keamanan energi menurut Jepang dan kaitan *Jieitai* dengan hal tersebut. Beberapa tempat strategis yang dibahas terkait peran *Jieitai* dengan keamanan energi Jepang dibatasi hanya pada beberapa wilayah di Asia Pasifik yang dianggap sangat penting yaitu Kepulauan Spratly, Selat Singapura, dan Selat Malaka.

### 1.5 Pendekatan dan Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil sebuah penelitian sejarah, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dengan metode deskriptif analisis.

Sumber-sumber penelitian didapat melalui bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan sangat terbatas oleh tersedianya sumber-sumber tersebut.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diupayakan agar segala informasi dan pembahasan setiap bab dapat digunakan sebagai dasar pemahaman bab berikutnya secara logis.

Bab 1 merupakan pendahuluan yang menerangkan mengenai motivasi yang mendasari penulisan. Kemudian dijelaskan pula secara singkat tujuan, ruang lingkup, pendekatan dan metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini.

Pada bab 2 dibahas segala sesuatu tentang *Jieitai*, baik sejarah pembentukan, tujuan pembentukan, peran serta fungsi, dan bagian-bagian *Jieitai*, yaitu *Rikūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Darat), *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut), dan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara).

Kemudian pada bab 3 dijelaskan mengenai krisis energi bagi Jepang yang terdiri dari krisis pertama energi minyak dunia dan krisis kedua energi minyak dunia, bentuk konsep keamanan energi bagi Jepang, penjelasan singkat mengenai wilayah-wilayah di kawasan Asia Timur yang memerlukan jaminan akan keamanan pasokan energi menurut Jepang, seperti Selat Malaka, Kepulauan Spratly, dan Terusan Bashi, dan langkah-langkah yang diambil Jepang dalam mengatasi masalah keamanan energinya.

Selanjutnya, bab 4 memaparkan analisis mengenai peranan *Jieitai* khususnya *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut) dan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara) dengan keamanan energi menurut Jepang. Dalam bab ini dijelaskan mengenai potensi konflik dengan negara Cina terkait keamanan energi, peran *Jieitai* dalam menghadapi strategi militer Cina untuk menjaga keamanan energi, menjaga pasokan minyak di beberapa *choke points* kawasan Asia Pasifik, dan SLOC (*Sea Lanes of Communication*), seperti Kepulauan Spratly, Selat Singapura, dan Selat Malaka.

Pada Bab terakhir dituliskan kesimpulan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya.

## 2. JIEITAI (PASUKAN BELA DIRI)

### 2.1 Sejarah Pembentukan *Jieitai*

Sejarah pembentukan *Jieitai* (Pasukan Bela Diri) dimulai ketika pada Perang Pasifik, Jepang mengalami kekalahan dan menyerah kepada tentara Sekutu, yang sebenarnya adalah tentara Amerika Serikat. Setelah itu, Jepang menerima Deklarasi Postdam dan menyatakan berakhirnya perang melalui radio pada tanggal 15 Agustus 1945.

Secara resmi penyerahan Jepang pada Sekutu dilakukan dengan penandatanganan dokumen penyerahan tanpa syarat di atas kapal Missouri, di Teluk Tokyo, pada tanggal 2 September 1945 oleh anggota kabinet *ad interim*, di bawah pimpinan menteri luar negeri dan kepala staf angkatan.<sup>17</sup> Mulai saat itulah, tentara Sekutu menduduki Jepang, mendirikan markas besar di Tokyo, dan melaksanakan prinsip-prinsip Pemerintahan Jepang oleh panglima tertingginya, Jenderal MacArthur.<sup>18</sup>

Penyerahan tanpa syarat ini berpengaruh besar dalam segala bidang kehidupan di Jepang, termasuk dalam bidang militer. Militer Jepang harus menerima berbagai kebijakan perombakan oleh Amerika Serikat. Salah satu kebijakan yang terpenting adalah pembentukan Undang-undang Dasar Baru Jepang (*Nihon Koku Kenpō*) pada tanggal 3 November 1946 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 3 Mei 1947. Undang-undang Dasar ini melarang Jepang

---

<sup>17</sup> James Buck. *The Japanese Military System* (London: Sage Publications, 1975), hlm. 43

<sup>18</sup> Michael Chinworth. *Inside Japan's Defense, Technology, Economics and Strategy* (New York: Brasseys Inc, 1992), hlm. 9

untuk melakukan penyerangan ke negara lain dan berperang, seperti yang termaktub dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2.<sup>19</sup>

Kemudian pada bulan Juni 1950, pecahlah perang Korea. Pada saat itu, karena tentara Amerika Serikat yang menduduki Jepang dikirimkan ke Korea, terjadi kekosongan tentara penjaga keamanan di Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Juli 1950 Jenderal MacArthur memerintahkan pada Pemerintah Jepang yaitu Kabinet Yoshida Shigeru untuk segera membentuk Kesatuan Polisi Cadangan Nasional (*Keisatsu Yobitai*). Kesatuan Polisi Cadangan Nasional ini dibentuk secara resmi pada tanggal 10 Agustus 1950, dengan jumlah 75.000 orang.<sup>20</sup>

Walaupun pembentukan Kesatuan Polisi Cadangan Nasional (*Keisatsu Yobitai*) ini dianggap melanggar Undang-undang Dasar Baru Jepang (*Nihon Koku Kenpō*), Amerika Serikat tetap menginginkan Jepang untuk ikut bertanggung jawab atas pertahanan keamanannya di wilayah Asia Pasifik. Di lain pihak, Amerika Serikat juga memberikan kesempatan kepada Jepang untuk membangun kembali perekonomiannya yang hancur setelah kalah perang dengan diadakannya perjanjian perdamaian San Fransisco dan perjanjian Keamanan Jepang-Amerika (*Nichibeī Anzen Hosho Jōyaku*) atau *Anpo Jōyaku*, dan mulai berlaku pada tanggal 8 September 1951.<sup>21</sup> Perjanjian ini menandakan pendudukan tentara Sekutu di Jepang telah berakhir, kecuali di Okinawa (Ryūkyū) dan sekitarnya.<sup>22</sup>

Setelah tugas *Keisatsu Yobitai* berakhir pada tahun 1952, pada tanggal 31 Januari 1952, PM Yoshida Shigeru mengusulkan pada Komite Anggaran Belanja Negara untuk membentuk pasukan keamanan yang baru sesuai dengan keamanan nasional dan situasi internasional pada saat itu.<sup>23</sup> Usulan PM Yoshida Shigeru ini sempat ditentang oleh Partai Demokrat (*Nihon Minshutō*) dan Partai Sosialis (*Nihon Shakaitō*), namun pemerintah tetap membentuk *Kaijō Keibitai* (Pasukan Pertahanan Laut) pada tanggal 26 April 1952. Kemudian dibentuk Badan Keamanan Nasional (*Hoanchō*) pada tanggal 1 Agustus 1952 dan *Keisatsu Yobitai*

<sup>19</sup> Hizahiko Okazaki. *A Grand Strategy for Japanese Defense*. (Tokyo: University Press of America, 1986), hlm. 76-77

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 78

<sup>21</sup> Ferry Rustam. *Laporan Penelitian: Hubungan Dinamika Eksternal dengan Pertahanan Jepang setelah Perang* (FSUI, 1996), hlm. 17

<sup>22</sup> ibid.

<sup>23</sup> ibid, hlm. 19

diubah menjadi *Hoantai* (Pasukan Keamanan Nasional), yang pada akhirnya menjadi *Jieitai* (Pasukan Bela Diri) pada tahun 1954.<sup>24</sup>

Perubahan *Hoantai* (Pasukan Keamanan Nasional) menjadi *Jieitai* disarankan oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru dan Shigemitsu Mamoru, Ketua Partai Progresif Jepang (*Nihon Shinpotō*). Selain itu, mereka berdua menyarankan agar pemerintah menentukan kebijaksanaan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang dan menetapkan rencana pertahanan jangka panjang. Setelah berunding dengan Amerika Serikat melalui Persetujuan Ikeda-Robertson, yang dilanjutkan dengan Persetujuan Saling Membantu Pertahanan Jepang-Amerika (*Sōgō Bōei Kūjō Kyōtei*) pada tanggal 8 Maret 1954, pada tanggal 9 Maret 1954 Kabinet Yoshida menyetujui Rancangan Undang-undang Pembentukan Badan Pertahanan dan Pasukan Bela Diri. Kemudian RUU ini oleh Parlemen disetujui pada tanggal 2 Juni 1954. Undang-undang ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 1954. Pada tanggal yang sama pula didirikanlah *Jieitai* atau Pasukan Bela Diri, yang terdiri dari *Rikūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Darat), *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut) dan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara).

## 2.2 Peran dan Misi *Jieitai* secara Umum

Pada awal pembentukannya, *Jieitai* yang merupakan bagian dari pertahanan nasional Jepang, ditetapkan atas dasar 3 petunjuk, yaitu:

- a. Dalam hal terjadi agresi mendadak terhadap Jepang
- b. Apabila tidak mungkin dilakukan tindakan balasan lain yang memadai
- c. Kekuatan minimum yang diperlukan untuk mengusir agresi<sup>25</sup>

Pertahanan nasional memang merupakan peran *Jieitai* yang paling penting. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Pasukan Bela Diri Jepang.

---

<sup>24</sup> Toshihiro Yamauchi. *Constitutional Pacifism: Principle, Reality, and Perspective in FIVE DECADES of CONSTITUTIONALISM Jieitaiho*. Undang-Undang No. 165 tahun 1954, Catatan 4, hlm 27 (diskusi mengenai pembentukan Pasukan Bela Diri)

<sup>25</sup> Matsu Foro. "Self Defense Forces" (Kodansha Ltd: Encyclopedia of Japan, 1983), hlm. 59

Article 3 of the Self Defense Force law states:

The chief function of the SDF is to preserve the peace and independence of our country and to defend againsts direct and indirect aggression threatening the security of the nation. When the need arises, the SDF will also be employed to preserve public order.<sup>26</sup>

Pasal 3 :

Misi penting dari Pasukan Bela Diri adalah untuk membina perdamaian dan kemerdekaan Negara, dan untuk mempertahankan Jepang terhadap ancaman agresi langsung dan tidak langsung yang mengancam keamanan negara. Pasukan Bela Diri juga akan digunakan untuk membina ketertiban umum apabila dibutuhkan.

Hal ini dipertegas dalam rencana pertahanan Jepang selanjutnya, yang menetapkan *Jieitai* sebagai pertahanan nasional yang siap menghadapi ancaman dan beragam situasi:

- a. Merespon adanya serangan rudal balistik. Jepang akan membangun struktur kekuatan pertahanan, termasuk sistem pertahanan rudal balistik, untuk menahan serangan rudal balistik.
- b. Merespon adanya serangan gerilya dan unit operasi khusus. Jepang akan menjaga struktur kekuatan pertahanan dalam menjawab serangan yang dilakukan oleh para gerilyawan dan unit operasi khusus dengan cara meningkatkan kesiagaan dan mobilitas unit kekuatan pertahanan serta menahan serangan tersebut.
- c. Merespon adanya invasi terhadap kepulauan terpencil. Jepang akan menjaga struktur kekuatan pertahanan dalam menjawab invasi terhadap kepulauan terpencil tersebut dengan cara meningkatkan dan memeperkuat kemampuan, mengirim dan menempatkan pasukan serta dengan menahan invasi.
- d. Melakukan patroli dan pengawasan di batas terluar laut dan udara, serta menjawab pelanggaran wilayah udara dan penyusupan pasukan perahu operasi khusus dan lainnya, Jepang akan menjaga struktur kekuatan pertahanan, termasuk kapal induk, pesawat udara dan aset lainnya untuk menjaga batas terluar laut dan udara. Selain itu juga akan menjaga unit-

---

<sup>26</sup> *ibid.*

unit pesawat tempur untuk menjawab adanya pelanggaran wilayah udara. Dan juga akan menjaga satuan penghancur dan aset lainnya untuk menjawab adanya perahu bersenjata operasi khusus dan kapal selam asing yang menyelam di wilayah perairan Jepang.

- e. Merespon adanya bencana (kecelakaan) berskala besar (bencana nuklir, biologis, dan kimia). Jepang akan membantu dalam berbagai situasi, antara lain bencana nuklir berskala besar, yang membutuhkan perlindungan kehidupan, dengan cara menyediakan pasukan yang diperlengkapi dengan satuan unit pertahanan dan kemampuan khusus untuk melaksanakan operasi perbaikan di semua wilayah Jepang.<sup>27</sup>

Selanjutnya, Kemampuan dan peran *Jieitai* semakin ditingkatkan seiring dengan kondisi keamanan dunia yang selalu berubah-ubah. Dalam *National Defense Program Guidelines FY 2005* atau Petunjuk Program Nasional Pertahanan Jepang Tahun 2005, yang disahkan oleh Dewan Keamanan dan Kabinet pada tanggal 10 Desember 2004, *Jieitai* memiliki 3 peran, yaitu:

1. Sebagai pertahanan nasional  
Pasukan Bela Diri Jepang bertugas mencegah agresi yang dilakukan oleh negara lain ke Jepang, dan meminimalisasi terjadinya kehancuran. Bersama dengan Amerika Serikat sesuai dengan Aliansi Keamanan Jepang–Amerika Serikat, *Jieitai* berusaha meningkatkan kemampuan pertahanan.
2. Merespon bencana yang berskala besar dan beragam situasi  
Dalam menghadapi bencana berskala besar yang disebabkan oleh aksi terorisme atau situasi lain yang membutuhkan perlindungan nyawa dan aset-aset berharga, *Jieitai* akan mengambil tindakan yang tepat dan sigap, termasuk dalam menyediakan makanan sebagai bantuan bencana. Berlaku pula bila *Jieitai* diminta bantuannya oleh organisasi yang berkepentingan. Ini menunjukkan *Jieitai* juga berperan terhadap kesejahteraan umum.

---

<sup>27</sup> Japan Defense Agency. *2001 Defense of Japan* (Japan: Urban Connections, 2001), hlm. 85-86

Bila terjadi situasi yang mencekam di wilayah sekitar Jepang, yang akan berpengaruh penting pada kedamaian dan keamanan nasional, *Jieitai* akan mengambil langkah sesuai dengan konstitusi, hukum dan peraturan lain, misalnya mendukung kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa ketika dibutuhkan dan menyiapkan perlengkapan efektif sesuai dengan Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat.

3. Berkontribusi dalam menciptakan lingkungan keamanan yang lebih stabil  
*Jieitai* berkontribusi dalam perdamaian internasional dengan berpartisipasi dalam kegiatan kerja sama perdamaian internasional dan berkontribusi mempromosikan kerja sama internasional melalui kegiatan bantuan bencana internasional. Secara berkelanjutan, *Jieitai* juga mempromosikan dialog-dialog keamanan dan melakukan pelatihan pertahanan bersama dengan negara lain, termasuk negara tetangga demi kerja sama yang saling menguntungkan. *Jieitai* bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lain dengan tujuan mencegah penciptaan senjata penghancur massal dan misil, seperti halnya juga mengontrol dan mengatur persenjataan konvensional.

### 2.3 ***Rikujō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Darat)**

*Rikujō Jieitai* semula bernama *Hoantai* (保安隊). *Rikujō Jieitai* dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1952. Tugas utamanya adalah mencegah, menghadapi agresi dari negara asing dan melindungi seluruh rakyat Jepang dari segala kekacauan di darat.

*Rikujō Jieitai* memiliki markas besar di lima wilayah Jepang. Di wilayah utara, markasnya berada di Sapporo, Hokkaido. Di wilayah timur laut bermarkas di Sendai, Prefektur Miyagi. Di wilayah timur bermarkas di Asaka, Tokyo. Markas besar Pasukan Bela Diri terdapat di Ichigaya, Tokyo. Di wilayah barat bermarkas di Kengun, Prefektur Kumamoto. Sedangkan di Jepang tengah bermarkas di Itami, Prefektur Hyogo.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *ibid.*, hlm. 93

Dalam *National Defense Program Guidelines FY 2005*, unit infantri *Rikujō Jieitai* diperkuat supaya memungkinkan *Rikujō Jieitai* dalam menghadapi ancaman-ancaman baru dan beragam situasi termasuk serangan-serangan gerilya, dan serbuan operasi pasukan tertentu, invasi yang terjadi dari luar pantai, dan bencana alam khusus dan berskala besar.<sup>29</sup>

*Rikujō Jieitai* terdiri dari 8 divisi dan 6 brigade, ditempatkan di 14 wilayah, yaitu Nerima, Asahikawa, Senzo, Fukuoka, Obihiro, Jinmachi, Higashichitose, Kitakumamoto, Aomori, Moriyama, Makomanai, Soumahara, Kaitaichi, dan Zentsuji. Hal ini dilakukan atas pertimbangan mengenai geografi Jepang yang terdiri dari pegunungan, sungai-sungai, dan selat-selat.<sup>30</sup>

Berdasarkan *National Defense Program Guidelines FY 2005*, *Rikujō Jieitai* memiliki 155.000 personel, dengan Pasukan Reguler 148.000 dan pasukan yang siap sedia 7.000 personel. Pasukan Bela Diri Darat terdiri dari 8 divisi, 6 brigade, 1 divisi perlengkapan, 8 grup artileri anti-pesawat udara, dan disertai oleh tank dan artileri utama, yang masing-masing berjumlah ± 600 buah.

#### 2.4 *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut)

*Kaijō Jieitai* semula bernama *Kaijō Keibitai* (海上警備隊) atau Polisi Penjaga Keamanan Laut. *Kaijō Jieitai* dibentuk pada tanggal 26 April 1952. Tugas utamanya adalah melindungi dan mengamankan lautan Jepang dari segala macam invasi. Selain itu, *Kaijō Jieitai* juga berperan penting dalam pengamanan jalur laut atas pasokan energi kebutuhan Jepang.<sup>31</sup> Beberapa jalur laut yang penting bagi pasokan energi Jepang di antaranya adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, dan Kepulauan Spratly.<sup>32</sup> Dalam menjalankan tugasnya ini, *Kaijō Jieitai* bekerja sama dengan Pasukan Bela Diri yang lain, terutama dengan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara).<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Japan Defense Agency. *2005 Defense of Japan* (Japan: Urban Connections, 2005), hlm 125

<sup>30</sup> *ibid*, hlm 126

<sup>31</sup> Richard Drifte. *Arms Production in Japan* (Colorado: Westview Press, 1989), hlm. 16

<sup>32</sup> Japan Defense Agency. *2005 Defense of Japan* (Japan: Urban Connections, 2005), hlm 73-74

<sup>33</sup> Kohei Hashimoto. *Asia's Energy Security and The Role of Japan: A Diplomatic Perspective* (United States: Institute for Public Policy of Rice University, 2000), hlm. 14

Dengan melihat terjadinya berbagai perubahan signifikan dalam kondisi keamanan akibat meningkatnya penciptaan senjata penghancur massal dan misil, meningkatnya aktivitas organisasi terorisme internasional, dan faktor lainnya, peran *Kaijō Jieitai* semakin ditingkatkan. Hal ini tercantum dalam *National Defense Program Guidelines FY 2005*, ada 5 fungsi, yaitu:

1. Merespon serangan rudal balistik
2. Merespon serangan yang dilakukan oleh gerilya dan operasi khusus lain.
3. Menghadapi invasi yang melewati wilayah kepulauan Jepang
4. Memberi peringatan dan penjagaan di area laut dan wilayah udara sekitar Jepang dan menghadapi invasi di wilayah kelautan Jepang
5. Memberikan bantuan pada bencana yang berskala besar. *Kaijō Jieitai* memberikan bantuan pada situasi-situasi tersebut yang terjadi di daerah laut.

*Kaijō Jieitai* memiliki unit-unit penghancur ( kapal perusak ), unit-unit kapal selam, unit-unit kapal penyapu ranjau, dan unit-unit patroli pesawat udara, dan lain sebagainya.<sup>34</sup> Selain itu, Pasukan Bela Diri Laut memiliki 5 divisi pertahanan, yaitu di Sasebo, Kure, Maizuru, Yokosuka, dan Ominato, ditambah Tsugaru dan Selat Tsusuhima.<sup>35</sup>

Berdasarkan *National Defense Program Guidelines FY 2005*, *Kaijō Jieitai* memiliki 8 divisi kapal perusak ( 4 kesatuan angkatan laut ) untuk operasi yang dapat bergerak kemana-mana, 5 divisi kapal perusak untuk unit-unit distrik regional, 4 divisi kapal selam, 1 kesatuan angkatan laut penyapu ranjau, dan 9 skuadron sebagai unit patroli pesawat udara. Pasukan ini juga dilengkapi perlengkapan seperti 47 armada kapal perusak, 16 armada kapal selam, dan ± 150 Pesawat Tempur.

---

<sup>34</sup> Japan Defense Agency 2005., *op.cit.*, hlm, 128

<sup>35</sup> *ibid*, hlm 129

## 2.5 *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara)

*Kūjō Jieitai* merupakan pasukan yang paling terakhir dibentuk. Tugas utamanya adalah melindungi Jepang dari serangan udara negara asing. Bersama *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut), *Kūjō Jieitai* memiliki tugas mengamankan pasokan energi minyak yang menuju ke Jepang.

Pasukan ini memiliki 4 daerah pertahanan, yaitu daerah pertahanan utara, daerah pertahanan pusat, daerah pertahanan barat, dan daerah pertahanan barat daya. Di setiap daerah pertahanan terdiri atas 2 kelompok penerbangan, kecuali di daerah pertahanan barat daya yang hanya terdiri dari 1 kelompok penerbangan. Daerah pertahanan utara terdiri dari Chitose dan Misawa. Daerah pertahanan pusat terdiri dari Komatsu dan Hyakuri. Daerah pertahanan barat, terdiri dari Tsuiki dan Nyutabaru. Sedangkan di daerah pertahanan barat daya adalah Naha.<sup>36</sup>

Berdasarkan *National Defense Program Guidelines FY 2005*, *Kūjō Jieitai* memiliki armada pengontrol udara yang terdiri atas 8 kelompok pemberi peringatan, 20 skuadron pemberi peringatan, 1 kelompok pesawat pemberi peringatan dini atau *airborne early-warning* ( 2 skuadron ), 12 skuadron armada tempur, 1 skuadron mata-mata udara, 3 skuadron armada transportasi udara, 1 skuadron armada pengisi bensin di udara, dan 6 kelompok armada pemandu misil dari permukaan ke udara. Pasukan ini masih dilengkapi perlengkapan seperti pesawat tempur ± 350 buah dan senjata pertahanan udara ± 260 buah. Pasukan Bela Diri Udara juga memiliki sebuah sistem BADGE (*Base Air Defense Ground Environment*) atau pertahanan lingkungan angkatan udara untuk peluncuran rudal.<sup>37</sup>

Secara keseluruhan *Kūjō Jieitai* juga dilengkapi aset pertahanan untuk armada dengan perlindungan sistem AEGIS (*Airborne Early warning/Ground environment Integration Segment*) sebanyak 4 buah, armada pengontrol udara 7 kelompok pemberi peringatan, 4 skuadron, serta 3 armada pemandu misil dari permukaan darat ke udara.

---

<sup>36</sup> *ibid*, hlm. 131

<sup>37</sup> *ibid*, hlm. 141

### 3. KEAMANAN ENERGI MENURUT JEPANG

#### 3.1 Krisis Energi bagi Jepang

Tidak ada negara industri yang memiliki masalah keamanan energi sebesar yang dihadapi oleh Jepang.<sup>38</sup> Negara yang miskin sumber energi sekaligus memiliki ekonomi ke-2 terbesar di dunia ini sangat bergantung pada perdagangan. Hampir 99% kebutuhan minyak Jepang diimpor dari negara lain<sup>39</sup>, dan  $\frac{3}{4}$  dari hasil impor tersebut didatangkan dari wilayah Teluk Persia. Jika terjadi interupsi atau penghentian pemenuhan sumber energi, khususnya minyak bumi, maka hal ini merupakan malapetaka bagi Jepang. Dibandingkan Amerika Serikat, Jepang lebih bergantung pada impor energi ( 88% berbanding 22%) dan sangat lebih bergantung pada minyak bumi ( 75% dari total seluruh energi yang dibutuhkan berbanding 50% ). (Committee for Energy Policy Promotion, 1980)

Segala kekacauan yang mengganggu jalannya aliran impor minyak menuju pelabuhan Jepang akan mengakibatkan 3 hal pada masyarakat Jepang secara keseluruhan, yaitu: kehancuran langsung pada kehidupan, kesehatan, dan keamanan umum; kehancuran perekonomian yang berakibat pada kenaikan harga dengan sangat cepat; dan perubahan yang tidak diinginkan dalam kebijakan luar negeri demi menjamin keamanan pasokan persediaan energi.<sup>40</sup> Efek yang paling ditakutkan oleh Jepang adalah kehancuran langsung pada kesehatan dan keamanan umum. Hal ini menyadarkan Jepang akan pentingnya masalah keamanan energi.

---

<sup>38</sup> David A Deese & Joseph S. Nye. *Energy and Security* (Cambridge: Ballinger Publishing Company, 1981), hlm. 211

<sup>39</sup> IEA extended energy balances 2006

<sup>40</sup> David A Deese & Joseph S. Nye., *op.cit.*, hlm 211

Secara historis, Jepang pernah menghadapi masalah yang berhubungan dengan keamanan energi. Jepang mengalami 2 kali "kejutan minyak" yang memengaruhi kehidupan Jepang<sup>41</sup>:

1. Krisis pertama energi minyak dunia pada tahun 1973 akibat embargo minyak oleh negara-negara Arab.
2. Krisis kedua energi minyak dunia pada akhir tahun 1979 yang memengaruhi keamanan energi dunia. Hal ini dipicu oleh Revolusi Iran.

Kemudian, pada tahun 1980, masalah keamanan energi menjadi perhatian utama di kancah perpolitikan Jepang.

### 3.1.1 Krisis Pertama Energi Minyak Dunia

Setelah Perang Dunia ke-2, Jepang memperbaiki negaranya dengan melakukan strategi industri untuk pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan impor sumber daya energi. Selama dalam proses membangun perekonomian ini, Jepang seperti kebanyakan negara-negara industri lainnya, menjadi sangat bergantung pada impor minyak murah sebagai sumber energi Jepang yang utama.

Terjadinya pendudukan Israel di atas tanah Palestina dan perjanjian antara Mesir dengan Israel menyebabkan negara-negara produsen minyak di Arab menjadi gusar, dan melakukan embargo minyak pada Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan terjadinya inflasi di Jepang, kepanikan pada daya beli masyarakat Jepang, dan penurunan suplai pada kebutuhan minyak Jepang. Penurunan suplai minyak Jepang pada tahun 1973 terjadi dengan tidak stabil: Oktober, 5%; November, 9%; Desember, 1%; Januari, 13%; Februari, 14%.<sup>42</sup> Pada saat itu dapat dikatakan untuk pertama kalinya Jepang mengalami "kejutan minyak."

Sebelum terjadinya krisis energi pada tahun 1973-1974, Jepang sebenarnya sudah cukup puas bergantung pada perusahaan-perusahaan minyak internasional utama untuk kebutuhan minyaknya dan tidak bergantung pada

<sup>41</sup> *ibid.*, hlm 213

<sup>42</sup> Wilfrid L. Kohl. *After The Second Oil Crisis* ( Massachusetts: Lexington Books, 1982), hlm.259

Timur Tengah.<sup>43</sup> Namun, embargo minyak Arab merubah segala pandangan Jepang akan hal tersebut.

Jepang sendiri membangun hubungan diplomasi dengan Israel pada tahun 1952. Ketika Terusan Suez ditutup pada krisis Suez 1956-1957 dan pipa saluran minyak Iraq dihancurkan, Jepang merasakan kenaikan dramatis atas biaya pengangkutan minyak karena rute perkapalan menjadi lebih panjang. Dan lagi selama Perang Timur Tengah pada tahun 1967, walaupun Jepang bukanlah target dari penghentian penyuplaian minyak, Jepang merasakan peningkatan lain dalam biaya perkapalan. Bagi Jepang, Timur Tengah sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan Jepang dan hanya sedikit pengaruhnya kecuali sebagai negara penyuplai minyak.<sup>44</sup>

Namun, krisis energi pada Oktober 1973 membuat Jepang lebih berhati-hati dalam mengambil langkah yang berhubungan dengan Timur Tengah. Dari dalam negeri Jepang sendiri, respon terhadap krisis dilakukan dengan memulai menimbun kebutuhan sehari-hari, akibat ketakutan akan terus berlanjutnya gangguan terhadap suplai minyak. Jepang kemudian menjadi sibuk untuk mendamaikan negara-negara penghasil minyak di Arab. Jepang mengikuti apa yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, yaitu melakukan "Diplomasi Sumber Daya Energi".<sup>45</sup>

Pada awal 1973, Jepang memperjelas keinginan mereka secara politik untuk berhubungan lebih dekat secara bilateral dengan negara-negara penghasil minyak. Dengan melihat keadaan krisis, Jepang menyadari bahwa mereka hanya akan mendapat sedikit keuntungan jika hanya bekerja sama dengan sesama negara pengonsumsi minyak. Oleh karena itu, Jepang berusaha menetralkan diplomasinya agar lebih dekat ke Arab demi kepentingan suplai minyak Jepang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasuhige Hirasawa dalam *Japan's Tilting Neutrality* mengenai diplomasi yang dilakukan Kabinet Tanaka pada tahun 1973:

---

<sup>43</sup> ibid.

<sup>44</sup> ibid

<sup>45</sup> Ronald A. Morse. *Japanese Energy Policy* (Cambridge, 1988), hlm 260

”On the Diplomatic front, the Tanaka cabinet’s response was to tilt Japan’s neutrality closer to Arab views in the hope that this would induce a lifting of the oil- supply restrictions on Japan. This new posture was announced publicly on November 22, 1973 by Chief Cabinet Secretary Susumu Nikaido in a statement to the press. This statement set forth Japan’s insistence that Israel’s forces be totally withdrawn from all the territories occupied in 1967 war; that the just rights of the Palestinians, based on U.N. Charter, should be recognized and respected; and, in a concluding passage, that the government of Japan will continue to observe the situation in the Middle East with grave concern and, depending on future developments, may have to reconsider its policy toward Israel.”<sup>46</sup>

Terjemahannya:

Dalam bidang diplomasi, respon Kabinet Tanaka adalah memiringkan kenetralan Jepang untuk lebih dekat ke Arab dengan harapan ini mampu mengangkat pembatasan suplai minyak ke Jepang. Sikap yang baru ini diumumkan di depan publik pada tanggal 22 November 1973 oleh Sekretaris Kepala Kabinet, Susumu Nikaido dalam pernyataannya kepada pers. Dalam pernyataannya diungkapkan bahwa Jepang mendesak Israel untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah yang diduduki pada Perang tahun 1967; yang mengindikasikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang seharusnya diakui dan dihormati, dan pada kesimpulan akhirnya Pemerintah Jepang akan melanjutkan pengamatan terhadap situasi Timur Tengah dengan perhatian pada pembangunan di masa yang akan datang, serta pengkajian ulang hubungannya dengan Israel.

Kemudian, pada Desember 1973, Wakil Perdana Menteri Takeo Miki, Menteri Dalam Negeri Saburo Okita, dan para ahli ekonomi internasional diutus ke Timur Tengah untuk misi selama 20 hari. Pada kesempatan ini, Jepang menjanjikan bantuan keuangan mulai dari bantuan keuangan kredit kepada Mesir untuk memperluas Terusan Suez, pinjaman swasta untuk membangun penyulingan minyak bagi Syiria, dan lain-lain.<sup>47</sup> Selain itu, Takeo Miki juga menjanjikan bahwa pada Januari 1974, akan ada kunjungan resmi pejabat tinggi Jepang untuk menindaklanjuti bantuan luar negeri yang telah disepakati.

Diplomasi untuk mengatasi masalah energi ini terus dilanjutkan oleh Jepang. Sunao Sunoda yang terpilih sebagai Menteri Dalam Negeri berikutnya untuk pertama kalinya pergi ke Timur Tengah pada Januari 1978. Dia juga

<sup>46</sup> Kasuhige Hirasawa. ”Japan’s Tilting Neutrality,” in J.C Hurewite, ed., oil, hlm. 140

<sup>47</sup> Nester, William. *Japan and the Third World: Pattern, Power, Prospects* (London: Macmillan, 1992), hlm. 42

membuka jalan atas kunjungan Perdana Menteri Takeo Fukuda di bulan September 1978, sebagai kunjungan pertama kali oleh seorang pemegang jabatan Perdana Menteri.

### 3.1.2 Krisis Kedua Energi Minyak Dunia

Ketika menghadapi krisis kedua energi minyak dunia, Jepang sukses mengatasi masalah suplai energi minyaknya. Kesuksesan strategi Jepang dalam menangani krisis minyak yang terjadi tahun 1978-1979 tidak dapat dilihat tanpa mempertimbangkan latar belakang keadaan dan karakteristik perekonomian Jepang. Keuntungan Jepang didapat dari kesatuan akan kondisi perekonomian dengan kondisi politik Jepang pada saat itu. Jepang memiliki pengeluaran yang rendah untuk pertahanan nasional (1% dari GNP), dan hal ini sangat menguntungkan Jepang. Anggaran lainnya dapat dialokasikan untuk membiayai energi sebagai dorongan ekspor barang-barang produksi.

Jeda waktu antara 1973 dan 1979 tidak disia-siakan oleh Jepang. Jepang belajar banyak mengenai langkah-langkah yang harus diambil selama terjadinya krisis energi. Ketika terjadi Revolusi Iran<sup>48</sup> yang mengakibatkan "kejutan minyak" yang ke-2 bagi Jepang, impor minyak Jepang berada pada level yang sama seperti tahun 1973 (4,9 juta b/d) dan 1978 (4,76 juta b/d).<sup>49</sup> Dari pengalaman Jepang menghadapi krisis pertama minyak dunia tahun 1973, pada krisis kedua energi minyak Jepang mengambil langkah :

"Japan had nearly doubled its 1973 official emergency oil stocks, giving them more confidence;  
The Japanese public was psychologically more aware of the problem of possible oil disruptions and the potential consequences;.....  
The Government do direct deals economics dictated a policy of tight money. Investment in energy-efficient facilities and technology continued with an emphasis on export....."<sup>50</sup>

Terjemahannya :

Jepang yang mengandakan stok persediaan minyak tahun 1973, memberikan Jepang lebih kepercayaan diri.

<sup>48</sup> Peristiwa ini terjadi pada bulan November 1979, ketika Iran menduduki Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, dan menyandera 52 orang diplomat. Peristiwa ini berlanjut dengan adanya boikot minyak Iran oleh Amerika Serikat.

<sup>49</sup> Ronald A. Morse. *op.cit.*, hlm. 261

<sup>50</sup> *ibid*

Publik Jepang secara psikologis telah lebih sadar akan kemungkinan masalah gangguan minyak dan potensi konsekuensinya...

Pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan ekonomi uang ketat. Selain itu, dilakukanlah investasi dalam berbagai fasilitas pengefisienan energi dan teknologi dilanjutkan dengan penekanan terhadap ekspor...

Pemerintah Jepang juga mengatasi krisis minyak dengan menjalankan fungsi MITI ( *Ministry of International Trade and Industry* ) atau Departemen Industri dan Perdagangan Internasional atas 2 langkah, yaitu :

1. MITI mendorong perusahaan-perusahaan minyak dalam negeri dan perusahaan-perusahaan dagang untuk mengamankan minyak mentah langsung dari negara-negara penghasil minyak
2. MITI menaikkan batas harga untuk pembelian pasar.

Dalam bidang diplomasi, untuk mengatasi masalah krisis energi ini kecenderungan pro-Arab terus berlanjut walaupun kasus Arab-Israel tidak secara langsung berhubungan dengan krisis ini. Jepang melanjutkan untuk memberikan prioritas pada hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara penghasil minyak. Pada bulan Juli 1979, Masumi Esaki, Menteri Industri dan Perdagangan Internasional, sekembalinya dari Timur Tengah mengungkapkan bahwa Jepang masih membutuhkan hal yang lebih realistis dalam menunjukkan perhatian pada wilayah tersebut demi kepentingan ekonominya. Merespon hal ini, pada tanggal 6 Agustus 1979, Perdana Menteri Sonoda menetapkan kebijakan politik Jepang terhadap Timur Tengah yang menunjukkan simpati Pemerintah Jepang terhadap pro-Arab semakin meningkat. Ia menekankan bahwa Jepang bebas dari kekuatan kolonial apapun, dengan tidak berminat mencampuri ideologi maupun politik pada wilayah Timur Tengah, bebas membangun hubungan yang mendukung pembangunan ekonomi yang sifatnya bebas dan merdeka dengan Timur Tengah.

Krisis kedua energi minyak dunia mempercepat kecenderungan Jepang dalam mendorong efisiensi energi industri dan pelaksanaan struktur energi yang lebih intensif. Selain itu, Jepang juga sukses dalam melaksanakan penghematan energi dan membangun hubungan perdagangan yang lebih erat untuk kepentingan ekonomi dan teknologinya.

### 3.2 Bentuk Konsep Keamanan Energi bagi Jepang

Sumber daya energi di dunia terdiri dari minyak bumi, batu bara, gas alam, tenaga nuklir, tenaga air / hidrolistik, dan sumber daya lain yang dapat diperbarui. Namun, minyak bumi menjadi sumber daya energi yang paling dibutuhkan untuk untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara Asia Timur.<sup>51</sup> Semakin lama jumlah permintaan energi dari Jepang, Cina, dan Korea Selatan untuk memajukan pembangunan ekonomi menjadi sangat besar. Selain itu, energi juga menjadi persoalan bagi pembangunan ekonomi internasional. Berdasarkan laporan dari UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mengenai kaitan energi dengan pembangunan ekonomi, sebagai berikut :

”... energy is one of the most important drivers of economic development and is a key determinant for the quality of our daily lives... it is probably the biggest business in the world economy, with a turnover of at least \$ 1.7 – 2 trillion a year ...”<sup>52</sup>

Terjemahannya:

”... energi adalah satu penggerak terpenting pembangunan ekonomi dan adalah sebuah faktor kunci yang menentukan kualitas kehidupan manusia sehari-hari... energi bisa jadi merupakan bisnis terbesar dalam ekonomi dunia, dengan sebuah pergantian sedikitnya 1,7–2 trilyun dolar Amerika setahun.....”

Bagi Jepang sendiri, dua kali ”kejutan minyak” menyadarkan betapa pentingnya menjaga pasokan energi minyak ke Jepang. Oleh karena itu, sejak tahun 1980, Jepang sebagai negara terbesar yang mengimpor energi bagi kebutuhan dalam negerinya, menjadikan keamanan suplai energinya sebagai perhatian utama.<sup>53</sup> Usaha-usaha Jepang untuk menjamin hubungan akan akses energi dengan keamanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan

<sup>51</sup> Mokhzani Zubir. *The Strategic Value of the Strait of Malacca* (Malaysia: MIMA, 2004), hlm. 6

<sup>52</sup> UNCTAD, “Analysis of Ways to Enhance the Contribution of Specific Services Sectors to the Development Perspectives of Developing Countries: Energy Services in International Trade: The strategic value of the Strait of Malacca Mokhzani Zubir 18 Development Implications”, Catatan Sekretariat UNCTAD, TD/B/COM.1/46, 10 December 2001

<sup>53</sup> *ibid*

terus memajukan perekonomiannya.<sup>54</sup> Hal inilah yang dikatakan sebagai konsep keamanan energi atau *energy security*.

Dalam pandangan negara-negara pengimpor minyak, paling tidak ada 3 konsep yang berbeda mengenai "keamanan energi"<sup>55</sup> :

1. Keamanan energi dapat dilihat secara sempit sebagai sebuah garansi kecukupan suplai energi yang memungkinkan suatu negara berfungsi selama perang.
2. Keamanan energi dapat dipandang secara luas sebagai sebuah keyakinan kecukupan suplai energi suatu negara untuk menjalankan ekonomi nasionalnya pada level normal.
3. Keamanan energi dilihat sebagai keyakinan kecukupan suplai energi yang mengizinkan ekonomi nasional suatu negara berfungsi dalam sebuah cara yang diterima secara politik.

Dari penjabaran konsep tersebut, secara umum dan singkat dapat dikatakan bahwa keamanan energi sangat erat kaitannya dengan keamanan ekonomi.

Konsep "keamanan energi" bagi Jepang secara nasional adalah suatu proses mengamankan kebutuhan energi yang diperlukan untuk keseharian masyarakat Jepang dan kepentingan ekonomi. Konsep ini secara menyeluruh harus memiliki 3 faktor yang disebut 3 *E's*, yaitu *Economic Growth*, *Environmental Protection*, dan *Energy Security*.<sup>56</sup> Setiap faktor memiliki peran penting, tetapi bagi Jepang yang terpenting adalah menyeimbangkan antara keamanan energi (*Energy Security*) dengan kebijakan / perlindungan lingkungan (*Environmental Protection*) demi tercapainya pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*).<sup>57</sup>

Dalam menyeimbangkan ketiga faktor tersebut, salah satu hal yang sangat dikhawatirkan Jepang adalah terputusnya suplai energi minyak. Hal ini dapat terjadi akibat embargo yang dilakukan oleh negara eksportir karena alasan politik,

<sup>54</sup> Kohei Hashimoto. *op.cit.*, hlm. 1

<sup>55</sup> Mussarrat Jabeen. "South Asia and Management of Energy Security" ( Institute of Regional Studies Islamabad, 2006), hlm. 1

<sup>56</sup> Hiroaki Fukami. "The Structuring of Energy Security and A Review of the Energy Security Policy Base" (Japan International Affairs, 1999), hlm 3.

<sup>57</sup> Kohei Hashimoto. *op.cit.*, hlm. 1

seperti halnya yang terjadi pada krisis energi minyak internasional pada tahun 1973 maupun 1979.

Selain karena embargo, terputusnya suplai minyak dapat juga diakibatkan oleh tindakan pihak ke-3 yang bermusuhan baik dengan pihak eksportir maupun importir. Suatu pemerintah negara yang bermusuhan atau organisasi teroris dapat saja menangkap atau menghancurkan fasilitas produksi utama bahkan memblok sebuah jalur transportasi aliran minyak.<sup>58</sup>

### 3.3 Wilayah-wilayah yang Memerlukan Jaminan Keamanan Energi Menurut Jepang

Masalah keamanan energi Jepang tidak dapat dipisahkan dari wilayah-wilayah strategis yang menjadi jalur pengiriman pasokan energi, khususnya jalur pengangkutan minyak bumi. Terkait dengan hal ini, Jepang merasakan pentingnya keamanan tempat-tempat strategis tersebut atau yang kemudian sering dikatakan sebagai *choke points*. Hal yang tak kalah pentingnya adalah kestabilan negara-negara di sekitarnya yang membatasi jalur-jalur tersebut.

Jalur laut sebagai jalur pengiriman pasokan energi memanjang dari Teluk Persia hingga Jepang dan Korea Selatan melalui Samudera Hindia, Asia Tenggara, Kepulauan Spratly, dan Terusan Bashi.<sup>59</sup> Jalur-jalur tersebut dapat dikatakan sebagai "garis kehidupan", dan aset penting bagi negara Asia yang pada masa mendatang nanti akan semakin bergantung pada hampir semua impor energi.<sup>60</sup> Jika ada negara atau sesuatu hal yang menghalangi penggunaan jalur laut tersebut, akan berdampak besar terhadap terjaminnya pemenuhan energi, tidak hanya pada negara-negara lain, tetapi juga pada negara itu sendiri. Bagaimanapun tidak semua negara di wilayah Asia Pasifik sangat bergantung pada jalur laut internasional penting tersebut karena berbagai rute jalur laut memberikan kepentingan yang relatif pada setiap negara di Asia Pasifik.<sup>61</sup> Rute perminyakan dari Teluk Persia menuju Jepang di kawasan Asia Pasifik adalah Selat Malaka, Kepulauan Natuna, dan Terusan Bashi. Sedangkan Selat Sunda dan Selat Lombok

<sup>58</sup> Mason Willrich. *Energy and World Politics* (London: Macmillan Publisher, 1978), hlm. 66

<sup>59</sup> Kohei Hashimoto. *op.cit.*, hlm. 6

<sup>60</sup> *ibid*

<sup>61</sup> *ibid.*, hlm 7

jarang dipergunakan oleh Jepang, kecuali bila di Selat Malaka terjadi pemblokiran atau penutupan jalur.

Di wilayah Asia Pasifik, yang paling memegang peran penting sebagai jalur pasokan minyak adalah Selat Malaka. Hampir seluruh negara baik di Asia Timur maupun Asia Pasifik bergantung penuh pada Selat Malaka. Selain digunakan sebagai jalur pasokan sumber daya energi, Selat Malaka juga digunakan sebagai jalur pengiriman produk-produk manufaktur dan komoditas lain. Walaupun begitu, sebenarnya frekuensi penggunaan Selat Malaka ini berbeda tergantung kepentingan setiap negara, begitupun pada selat-selat penting lainnya.

Secara umum, Myanmar dan Laos adalah negara-negara di antara 14 negara di Asia Timur dan Asia Tenggara yang tidak harus mendapatkan minyak melalui Selat Malaka. Hal ini disebabkan karena Myanmar dan Laos tidak memiliki jalan langsung menuju lautan. 12 negara lainnya sangat bergantung pada Selat Malaka. Jalur alternatif lain menuju Selat Malaka yang juga sangat penting dan sekarang ini sering digunakan adalah Selat Sunda dan Selat Lombok.<sup>62</sup>

*Choke point* lainnya adalah Kepulauan Spratly dan Terusan Bashi. Ada 5 negara yang mempergunakan jalur laut melewati Kepulauan Spratly, yaitu Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, dan Filipina. Sedangkan jalur laut yang melewati Terusan Bashi dipergunakan oleh Jepang dan Korea. Selain membawa minyak bagi Jepang dan Korea, Terusan Bashi yang berhubungan dengan Selat Taiwan juga mengantarkan kapal pengangkut minyak untuk konsumen di Cina Timur

Jepang sendiri sangat menyadari akan pentingnya menjaga pasokan energi minyak yang dibawa melalui beberapa *choke points* tersebut. Hal ini juga ditekankan dalam Defense of Japan tahun 2005. Daerah *choke points* sebagai jalur pasokan energi yang menjadi perhatian Jepang adalah sebagai berikut :

### 3.3.1. Selat Malaka

Selat Malaka adalah aset penting bagi semua negara Asia, termasuk Jepang. Keamanannya ditanggung oleh seluruh negara Asia. Kasus-kasus yang memungkinkan terjadinya gangguan pasokan energi minyak atau blokade di Selat

<sup>62</sup> Lim Hua Sing. *Peranan Jepang di Asia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 154

ini misalnya adalah sebuah kecelakaan dimana sebuah kapal muatan barang besar terdampar dan dapat mencegah akses menuju Selat Malaka.<sup>63</sup> Bahaya tentang masalah ini semakin meningkat di tahun-tahun mendatang seiring dengan semakin ramainya lalu lintas maritim di sekitar selat tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Jepang.

Langkah untuk mengurangi kecelakaan-kecelakaan maritim di Selat Malaka bisa jadi adalah dengan memutar rute banyak kapal yang melewati selat ini. Namun, hal ini bagaimanapun juga akan memakan biaya operasional kapal yang lebih tinggi, akibatnya hampir tidak ada kapal barang yang mau mengambil pilihan ini secara suka rela. Jepang sendiri tidak menginginkan adanya perubahan rute lebih demi efisiensi waktu dan biaya.<sup>64</sup> Namun, Jepang tidak berkeberatan memberikan bantuan, berupa kontribusi finansial sebagai dana berputar untuk mengelola Selat Malaka.<sup>65</sup>

### 3.3.2. Kepulauan Spratly

Kepulauan Spratly terletak di Laut Cina Selatan tepatnya di selatan Vietnam dan sebelah barat Filipina dengan jumlah pulau sekitar 230 buah. Luas daratannya 3 km<sup>2</sup> dan luas lautannya mencapai 244.700 km<sup>2</sup>. Jalur laut sepanjang Kepulauan Spratly yang dilewati kapal pengangkut pasokan energi minyak cukup sempit di tengah kepadatan lalu lintas kemaritiman. Oleh karena itu, kepulauan ini menjadi salah satu perhatian Jepang. Jika terjadi penutupan jalur laut yang melewati Kepulauan Spratly, hal ini akan berdampak pada kapal pengangkut minyak yang menuju Filipina, Cina, Taiwan, Jepang, dan Korea. Selain itu, hal ini juga akan merugikan perdagangan di kawasan Asia Tenggara.

Wilayah sekitar Kepulauan Spratly diklaim oleh 6 negara, yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pertengkar sengketa mengenai perebutan wilayah tersebut sudah menjadi agenda setiap tahunnya. Angkatan laut Cina dan angkatan laut Vietnam pernah terlibat perselisihan bersenjata atas hak Kepulauan Spratly pada tahun 1988. Sebenarnya area ini tidak

<sup>63</sup> Kohei Hashimoto. *op.cit.*, hlm. 8

<sup>64</sup> *ibid.*, hlm. 9

<sup>65</sup> Akio Ono. *Japan's Contribution to Safety and Pollution Mitigation in The Strait of Malacca* (Japan, 1997), hlm. 241

dapat dilihat sebagai tempat terjadinya konflik persenjataan secara langsung, tetapi sebagai area yang memiliki banyak potensi konflik.

Pada tahun 1992, Cina melalui kekuatan hukumnya yang sah secara unilateral mendeklarasikan bahwa Kepulauan Spratly adalah bagian wilayahnya. Reaksi-reaksi kuat berdatangan dari beberapa negara yang merasa juga memiliki hak atas Kepulauan Spratly. Pada tahun 1995, Cina membangun gedung kecil di atas Kepulauan Spratly, tepatnya di pulau karang Mischief (*Mischief Atoll*) yang wilayah tersebut sebenarnya telah diklaim oleh Filipina. Antara tahun 1998 dan 1999, Cina menambah dan memperbanyak gedung di wilayah pulau karang Mischief. Akibatnya, ketegangan di antara kedua negara tersebut semakin meningkat.

Pada tahun 1999, Malaysia sebagai salah satu negara yang juga merasa memiliki hak atas Kepulauan Spratly, memperpanjang fasilitas-fasilitas yang ada di pulau karang Investigator (*Investigator Atoll*) yang juga telah diklaim oleh Filipina. Hal ini sekali lagi mengakibatkan situasi menjadi panas dan menyulut terjadinya konflik persenjataan.

Konflik-konflik yang terjadi di Kepulauan Spratly dan sekitarnya inilah yang dapat mengganggu jalannya pasokan energi minyak menuju Jepang.<sup>66</sup> Hal ini dimungkinkan bila terjadi perang oleh negara-negara yang berebut wilayah Kepulauan Spratly di sekitar jalur lautnya. Akibatnya dapat menghambat akses masuknya kapal pengangkut minyak.

Dalam mengatasi konflik wilayah di sekitar Kepulauan Spratly, Jepang menginginkan adanya diplomasi preventif untuk meyakinkan keamanan dan kestabilan jalur kapal internasional di area tersebut. Usaha-usaha diplomasi yang diinginkan Jepang harus dibuat untuk mendorong deklarasi kerja sama yang mampu menjamin keamanan jalur tersebut dan menyetujui bahwa kemerdekaan wilayah-wilayah tersebut akan diselesaikan secara damai. Namun, Jepang menyadari juga bahwa langkah diplomatis tidaklah cukup, harus ada jaminan keamanan berupa pengawasan terhadap keamanan di jalur laut sekitar Kepulauan Spratly.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Kohei Hashimoto. *op.cit.*, hlm. 9

<sup>67</sup> Hiroaki Fukami. *op.cit.*, hlm. 6

### 3.3.3. Terusan Bashi

Terusan Bashi merupakan sebuah selat yang terletak di antara pulau Y'Ami milik Filipina dengan pulau Orchid milik Taiwan. Sama seperti halnya Kepulauan Spratly, Terusan Bashi merupakan salah satu *choke point* yang harus dilewati oleh kapal pengangkut minyak menuju Jepang. Jepang mengkhawatirkan konflik persenjataan antara Cina dan Taiwan yang dapat memengaruhi keamanan perjalanan di Terusan Bashi.<sup>68</sup> Jika terjadi konflik bersenjata atau perang, maka perairan sekitar Taiwan, termasuk Pantai Timur Taiwan yang banyak ditempatkan fasilitas militer akan terblokir. Hal ini akan membuat kapal-kapal kargo komersial tidak mau bernavigasi melalui atau dekat dengan Terusan Bashi.

Kemudian, jika perairan sekitar Taiwan telah terblokir, kapal-kapal dengan tujuan Jepang akan melayari utara dengan mengambil jalan dari timur melalui Selat Lombok. Perubahan jalan ini akan menambah ongkos perjalanan dan mengurangi efisiensi waktu. Dengan adanya resiko yang cukup tinggi ini, Jepang bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan bersama-sama mengusahakan suatu kerja sama untuk membantu meyakinkan konflik Cina – Taiwan agar terselesaikan tanpa melahirkan perang.<sup>69</sup>

### 3.4 Langkah-langkah yang diambil Jepang dalam Mengatasi Masalah Keamanan Energinya.

Bagi Jepang, langkah-langkah untuk menjamin pasokan energi minyak termasuk kontrol lalu lintas dalam setiap *choke point* seperti selat dan terusan sangatlah penting. Selain itu, perlu dilakukan pula upaya pencegahan kecelakaan dan upaya diplomasi untuk membantu mencegah konflik-konflik regional di sekitar jalur laut yang membawa pasokan minyak menuju Jepang. Jepang melaksanakan 3 langkah dalam mengatasi permasalahan keamanan energinya yaitu dengan langkah diplomasi, diversifikasi dan penghematan energi, serta pengawasan jaminan pasokan energi dengan pemberdayaan Pasukan Bela Diri Jepang.

<sup>68</sup> Kohei Hashimoto. *op.cit.*, hlm. 10

<sup>69</sup> *ibid*

### 3.4.1 Langkah diplomasi

Langkah diplomasi yang diambil Jepang dalam menghadapi masalah keamanan energinya mulai dilakukan ketika Jepang mengalami "kejutan minyak" yang pertama. Pada masa sekarang ini, langkah diplomasi diambil untuk mencegah terjadinya konflik regional di setiap *choke point* dan dilakukan untuk mengusahakan kerja sama antarnegara dalam penimbunan persediaan energi untuk keadaan darurat. Untuk itu ada 2 pokok persoalan yang harus diperhatikan, yaitu 1) dorongan yang dibutuhkan untuk memengaruhi negara-negara agar melakukan rencana penyimpanan minyak demi menjamin persediaan energi; 2) penempatan penyimpanan, penggunaan, pengawasan dan pendistribusian persediaan energi.

#### 3.4.1.1 Dorongan untuk melakukan kerja sama penyimpanan cadangan minyak

Berbeda dengan negara-negara Asia lainnya yang tidak berpengalaman dalam krisis energi, Jepang belajar banyak dari pengalaman atas dua kali "kejutan minyak." Jepang menyadari pentingnya penimbunan persediaan minyak untuk keadaan darurat. Dalam melaksanakan hal ini Jepang tidak dapat melaksanakannya sendirian, tetapi harus bekerja sama dengan negara lain.

Diplomasi yang dilakukan Jepang untuk memfasilitasi pembangunan kerja sama penyimpanan minyak mengutamakan pentingnya usaha perlindungan energi dan biaya yang lebih rendah atas kerja sama tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penentangan terhadap negara-negara tertentu yang memiliki persediaan cadangan energi hanya untuk kepentingan individu. Selain itu, Jepang juga berusaha mendorong pembangunan dan menyadarkan seluruh negara Asia untuk berbagi persediaan sumber daya energi minyak, resiko-resiko yang akan dihadapi bersama, dan SLOC (*Sea Lanes of Communication*) di masa mendatang.<sup>70</sup> Jepang sebagai negara yang memiliki pengalaman 2 kali krisis minyak, memainkan peran

---

<sup>70</sup> Tun Hwa Ko & Yu-ming Shaw. *Sea Lane Security in The Pacific Basin* (China: The Asia and World Institute Republic of China, 1983), hlm. 17

penting dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya menyimpan minyak sebagai persediaan.

Ada manfaat bagi Jepang bila berhasil dalam diplomasinya. Sambil mempromosikan kerja sama penyimpanan cadangan sumber energi minyak, Jepang menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya keamanan dari setiap *choke point*. Artinya Jepang sekaligus menjaga keamanan energinya sendiri dengan adanya jaminan pasokan minyak.

Namun, dalam pelaksanaannya ada banyak hal yang harus diselesaikan, termasuk lokasi tempat persediaan cadangan energi dan metode pengolahan minyak. Belum lagi kendala-kendala yang harus dihadapi, seperti terjadinya krisis keuangan di tahun 1998 yang menyebabkan hampir seluruh negara di Asia berhati-hati dalam mengambil tindakan yang berhubungan dengan masalah finansial. Tidak semua negara di Asia mendukung rencana penimbunan persediaan energi minyak yang pastinya membutuhkan dana tersendiri.<sup>71</sup>

#### **3.4.1.2 Penempatan penyimpanan cadangan minyak, penggunaan, pengawasan, dan pendistribusian persediaan energi.**

Lokasi penimbunan persediaan minyak harus dipertimbangkan mengingat setiap *choke point* memiliki akibat yang berbeda pada setiap negara di Asia. Efek pemblokiran setiap *choke point* bervariasi tergantung pada lokasi geografi setiap negara. Untuk itu perlu dilakukan pemisahan grup yang disesuaikan dengan kepentingan setiap negara pada setiap *choke point*.

Grup pertama adalah Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Pusat Penelitian Energi Asia Pasifik menyatakan bahwa Thailand memiliki cekungan yang mampu menyimpan sekitar 100 juta barrel minyak.<sup>72</sup> Jika kerja sama persediaan cadangan minyak dalam grup ini dapat terealisasi maka harga minyak bisa jauh lebih rendah, paling tidak untuk satu periode pendek atau sekitar 8 tahun.

Selain itu, sebuah pesediaan gabungan di Brunei dapat digunakan untuk menambah stok di Thailand, yang kemungkinan akan menggunakan tangki cadangan yang sudah tidak digunakan lagi di ladang minyak Brunei. Stok yang

<sup>71</sup> Kohei Hashimoto. *op.cit.*, hlm. 11

<sup>72</sup> *ibid*

ada di Brunei juga dapat memenuhi kebutuhan Filipina, Malaysia, dan sebagian Indonesia. Ada pula kemungkinan lain bagi Brunei, Indonesia, dan Malaysia membangun persediaan kecil supaya dapat digunakan jika terjadi gangguan suplai minyak di Asia Pasifik.

Grup kedua adalah Cina, Jepang, Taiwan, dan Korea. Ada kemungkinan besar Cina ingin membangun penyimpanan persediaan minyak bagi dirinya sendiri.<sup>73</sup> Di lain pihak, Jepang, Korea, dan Taiwan dapat memanfaatkan tempat penyimpanan cadangan minyak di Okinawa, Jepang.<sup>74</sup> Secara geografis, Okinawa berada di dekat Taiwan, sebelah utara Cina dan Korea Selatan. Namun, untuk melaksanakan rencana tersebut diperlukan sebuah hukum baru yang harus dibuat di Jepang. Hukum ini harus mengatur harga minyak yang dijual dari tempat penyimpanan minyak di Jepang, dan legalitasnya atas penjualan minyak mengingat adanya batasan penjualan minyak selama terjadi krisis energi minyak.<sup>75</sup> Kemudian, masalah pengawasannya pasti melibatkan Jepang yang akan menggunakan kekuatan militernya untuk bekerja sama dengan negara lain.<sup>76</sup>

#### **3.4.2 Langkah diversifikasi dan penghematan energi**

Jepang mulai melakukan diversifikasi energi sejak terjadinya "kejutan minyak" kedua yang dialaminya pada tahun 1979. Pembangunan sumber daya energi alternatif akan memperkecil ketergantungan Jepang pada minyak dari Teluk Persia. Hasilnya dalam masa sekarang ini sudah sangat baik sekali. Energi matahari dan tenaga angin telah dibangun sebagai pemenuhan permintaan listrik rumah tangga, begitu pun mobil-mobil hemat energi juga telah diciptakan demi menghemat energi minyak.

---

<sup>73</sup> ibid

<sup>74</sup> ibid

<sup>75</sup> ibid

<sup>76</sup> Tun Hwa Ko & Yu-ming Shaw. *op.cit.*, hlm, 47

### 3.4.3 Langkah pengawasan jaminan pasokan energi dengan pemberdayaan Pasukan Bela Diri Jepang

Jepang menyadari pentingnya mengawasi sekaligus menjamin pasokan energi minyak dengan pemberdayaan kekuatan militer mengingat adanya potensi ancaman Cina terhadap Jepang.<sup>77</sup> Untuk mengantisipasi hal ini, Jepang memperkuat militernya dan melakukan berbagai langkah pemberdayaan kemampuan *Jieitai* (Pasukan Bela Diri) khususnya *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut) dan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara) sebagai pengaman jalur laut bagi kebutuhan suplai bahan-bahan dan energi minyak Jepang.



---

<sup>77</sup> William T. Tow. 2001. *Subregional security Cooreration in the Third World* (United Stetes: Boulder Lynne Rienner), hlm 54.

#### 4. PERANAN *JIEITAI* DALAM KEAMANAN ENERGI JEPANG

Sebagai pengimpor minyak terbesar ke-2 di dunia, semua kebijakan Jepang yang berkaitan dengan masalah keamanan energinya akan sangat memengaruhi kepentingan ekonomi Jepang. Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, ada berbagai cara yang dilakukan oleh Jepang untuk melindungi keamanan energinya. Pada masa terjadinya "kejutan minyak" baik pada tahun 1973 dan 1979, Jepang memilih melakukan "diplomasi sumber daya energi" terhadap berbagai negara yang dianggap berperan penting pada pasokan energi minyaknya. Sedangkan mulai dasawarsa tahun 1990-an, Jepang mulai memikirkan cara untuk memperoleh jaminan pasokan energi, dengan memperkuat dan memberdayakan kekuatan militernya, yaitu *Jieitai* (Pasukan Bela Diri), khususnya *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut) dan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara). Langkah ini merupakan salah satu bentuk perlindungan lingkungan (*environmental protection*) sebagai salah satu bagian penting dari konsep keamanan energi (*energy security*) secara menyeluruh menurut Jepang.

Langkah peningkatan dan pemberdayaan kekuatan *Jieitai* diambil oleh Jepang mengingat ada potensi konflik militer terkait masalah keamanan energi dengan Cina, dan pentingnya penjagaan SLOC (*Sea Lanes of Communication*) di kawasan Asia Pasifik. SLOC atau jalur laut internasional adalah jalur lalu lintas transportasi laut yang membawa manusia dan barang.<sup>78</sup> Dalam hal ini, SLOC merupakan sebuah sektor perhubungan yang berfungsi sebagai penunjang utama, dan memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara karena sektor perhubungan mempunyai kekuatan untuk mendorong sektor-sektor

---

<sup>78</sup> Tun Hwa Ko & Yu-ming Shaw. *op.cit.*, hlm, 24

produksi. Banyaknya negara yang memilih mengimpor barang perdagangan maupun minyak melalui SLOC karena transportasi laut dianggap relatif murah, dan dapat mengangkut dalam jumlah besar dengan jarak yang cukup jauh. SLOC juga diterima sebagai penghubung perdagangan antarnegara karena kemajuan teknologi dan komunikasi yang memperpendek waktu tempuh di laut.

Selain itu, kekuatan *Jieitai* juga diperlukan untuk menjaga tempat-tempat strategis pemberhentian kapal-kapal pengangkut minyak dari Teluk Persia menuju Jepang, yang kemudian disebut *choke points*. *Choke points* adalah tempat-tempat pemberhentian penting sepanjang jalur laut internasional.<sup>79</sup> *Choke points* dianggap sebagai tempat strategis untuk persinggahan kapal-kapal perdagangan maupun kapal pengangkut minyak yang melayani perdagangan antarnegara. Biasanya *choke points* berupa pelabuhan atau tempat-tempat pengisian bahan bakar bagi kapal-kapal yang akan meneruskan perjalanannya

#### **4.1 Potensi Konflik dengan Negara Cina**

Permintaan minyak bumi dan gas Cina akan meningkat 5,4 % per tahun, dan pada tahun 2010 akan melampaui Jepang. Pada tahun 2020, total permintaan energi Cina akan mencapai 21 juta barrel per hari.<sup>80</sup> Ada banyak pilihan yang dapat diambil Cina dalam menghadapi pertumbuhan dan permintaan energi ini, seperti membangun ladang minyak bersama di Siberia Timur ataupun di Kepulauan Sakhalin, meningkatkan kekuatan militer maupun nuklir, dan mengandalkan impor minyak dari negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia. Kebijakan energi apapun yang diambil Cina akan memengaruhi kebijakan luar negerinya.

Strategi energi Cina menjadi perhatian Jepang. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran Jepang akan terancamnya persediaan energi yang sudah stabil dari Teluk Persia akibat strategi Cina yang memungkinkan terjadinya "Perang Sumber Daya Energi."<sup>81</sup> Kekhawatiran yang lain adalah bahwa Cina yang melihat impor energi sebagai masalah hidup dan mati, akan melakukan hal-hal yang dapat

---

<sup>79</sup> ibid

<sup>80</sup> Kohei Hashimoto. *op.cit.*, hlm. 3

<sup>81</sup> ibid

merugikan Jepang pada jalur laut, yang berarti juga dapat membahayakan kestabilan keamanan Asia.

Kedua kekhawatiran Jepang tersebut menjadi ancaman nyata pada masa-masa sekarang. Konsep ” Perang Sumber Daya Energi” muncul dari kenyataan bahwa impor energi Asia telah meningkat secara signifikan dan permintaan energi yang tinggi dari Cina telah membuat sebuah spekulasi bahwa negara-negara di wilayah Teluk Persia sebagai negara penghasil minyak tidak akan mampu menghadapi pesatnya pertumbuhan permintaan minyak negara-negara Asia, oleh karena itu mereka memilih untuk hanya memberikan sumber daya energi pada negara-negara yang berpotensi menguntungkan mereka juga.<sup>82</sup> Hal-hal ini menjadi kekhawatiran Pemerintah Jepang.

Di lain pihak, dalam mengatasi masalah keamanan energinya, Cina melakukan pengembangan militer.<sup>83</sup> Cina yang menyadari ketidakmampuannya dalam menstabilkan Timur Tengah karena tidak memiliki pengaruh kuat di kawasan tersebut, memilih untuk menjaga dengan serius jalur laut terbuka, dan mengamankan kapal-kapal pengangkut minyak yang bernavigasi melalui *choke points* di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, Cina yang sangat memerhatikan keamanan transportasi pelayaran, khususnya di Selat Malaka, menugaskan Angkatan Laut Cina atau PLA ( *People’s Liberation Army* ) untuk menjaga jalur laut internasional terbuka, dan mengawal kapal-kapal tanker Cina yang bernavigasi di setiap *choke point* yang strategis di kawasan Asia. Selain itu, Cina juga melakukan pelatihan angkatan laut gabungan dengan Prancis yang berorientasi pada pengontrolan dan penjagaan jalur laut.<sup>84</sup> Bagi Cina, penggunaan kekuatan angkatan laut untuk mengontrol jalur perkapalan di dalam rute pasokan minyak adalah sangat penting, terutama di Selat Malaka. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Cina, Hu Jintao pada bulan November 2003 :

”Malacca Dilemma” is a key element to China’s energy security. Certain Powers ( the United States ) have all along encroached on and tried to control the navigation to through the strait.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> ibid

<sup>83</sup> Michael E Brown. *op.cit.*, hlm. 19

<sup>84</sup> Mokhzani Zubir. *The Strategic Value of the Strait of Malacca* ( Malaysia: MIMA, 2004), hlm.9

<sup>85</sup> ibid

Terjemahannya:

“Dilemma Malaka” adalah unsur kunci untuk keamanan energi Cina. Negara-negara besar (Amerika Serikat ) melanggar batas, dan mencoba mengontrol pelayaran yang melalui Selat tersebut.

Selain itu, para ahli militer Cina juga merekomendasikan agar Cina melakukan strategi angkatan laut baik ofensif (menyerang) maupun defensif (bertahan) dengan membangun kapal perang secara besar-besaran dan kapal selam untuk menjaga dominasi pasukan Amerika Serikat di laut bebas.<sup>86</sup> Langkah militer ofensif adalah untuk menyiapkan pasukan reaksi cepat ketika terjadi krisis, sementara militer defensif menyiapkan kemampuan pertahanan yang dapat diandalkan.

Ancaman Cina dalam masalah keamanan energi lebih merupakan masalah politik dibandingkan masalah ekonomi. Rencana militer tersebut dilakukan mengingat ancaman terhadap Cina atas kebijakan baru-baru ini di kawasan Asia Timur.<sup>87</sup> Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah aliansi keamanan antara Amerika Serikat dengan Jepang yang lebih kuat, dan kerja sama kemaritiman yang lebih dekat antara Jepang dengan Korea.

Hal yang berbahaya dari situasi ini adalah apabila hubungan Cina dengan Amerika Serikat memburuk, terutama bila dalam masalah Taiwan. Jika hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Taiwan meningkat, Cina berpotensi merealisasikan semua rencana tersebut, dan meningkatkan proyek kekuatan angkatan lautnya sebanyak mungkin untuk menjaga keamanan energinya.

Selain itu, Cina juga dapat membangun kekuatan yang lebih banyak dalam mengontrol Kepulauan Spratly dan Kepulauan Senkaku. Pembangunan unilateral Cina atas sumber daya minyak di dekat pulau-pulau tersebut menyebabkan percekocokan dengan negara-negara tetangga Cina, tidak terkecuali dengan Jepang. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya konflik regional yang dapat menimbulkan masalah keamanan energi di Asia.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Jepang berjaga-jaga dan memastikan bahwa Cina seharusnya berbagi jalur laut secara damai dengan negara-negara

---

<sup>86</sup> ibid

<sup>87</sup> Xuegang, Zhang. 2007. “Southeast Asia and Energy: Gateway to Stability” dalam China Security Vol 3 No.2. World Security Intitute: China.

tetangganya, dan menahan diri dalam menyokong dirinya sendiri untuk meningkatkan proyek kekuatan angkatan lautnya. Akan sangat berbahaya bagi keamanan jalur laut apabila Cina mencoba mengatur jalur laut sendirian tanpa bekerja sama dengan negara-negara tetangganya. Hal terbaik yang harus dilakukan oleh Jepang terhadap Cina adalah melakukan diplomasi yang dapat meyakinkan Cina, namun dengan terus meningkatkan kemampuan militer Jepang sebagai langkah waspada akan strategi militer Cina dalam menghadapi masalah keamanan energi.<sup>88</sup>

#### **4.2. Peran *Jieitai* dalam Menghadapi Strategi Militer Cina untuk Menjaga Keamanan Energi.**

Untuk mengantisipasi kemungkinan ada potensi ancaman tersebut, berbagai langkah ditempuh oleh Jepang dengan :

1. Meningkatkan kemampuan pengisian bahan bakar pesawat di udara (*air-refueling*) yang berguna untuk memperluas wilayah jangkauan operasi militer di kawasan selatan Jepang

Pada tahun 2001, *Kūjō Jieitai* mengandalkan 3 pesawat terbang yang dapat membawa 200 orang dan mampu terbang pada ketinggian 10.000 km tanpa memerlukan pengisian bahan bakar (*refueling*)

Namun, seiring dengan meningkatnya potensi ancaman militer Cina terkait dengan keamanan energi, Badan Pertahanan Jepang (*Japan's Defense Agency*) mulai merencanakan pelatihan dan kemampuan *air-refueling* oleh *Kūjō Jieitai* bekerja sama dengan militer Amerika Serikat pada bulan April 2003. Pesawat tempur F-15 milik *Kūjō Jieitai* diisikan bahan bakarnya oleh kapal-kapal tanker milik Pasukan Udara Amerika Serikat.

Berdasarkan Program Pembangunan Pertahanan FY 2001-2005, Badan Pertahanan Jepang memperkenalkan 4 tanker berdasarkan model Pesawat Terbang Boeing Co.767. Model tanker yang pertama dikirimkan mulai April 2006. Badan Pertahanan Jepang bermaksud untuk memulai pengoperasian tanker-tanker tersebut pada tahun pembukuan 2008. Badan

---

<sup>88</sup> Michael T Klare. *op.cit.*,hlm. 61

Pertahanan Jepang berencana melatih 8 perwira *Kūjō Jieitai* tahun 2003 hingga 2006, dan melaksanakan tes operasional tersebut pada tahun 2007.

2. Meningkatkan kemampuan (*upgrade*) pangkalan udara yang terletak di pulau-pulau di sekitar Kepulauan Senkaku;

Kepulauan Senkaku merupakan salah satu wilayah sengketa antara Jepang dengan Cina. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik dengan Cina, Jepang melakukan peningkatan kemampuan pangkalan udara di pulau-pulau sekitar Kepulauan Senkaku dengan melakukan *upgrade* terhadap unit-unit pesawat udara pemberi peringatan dan pengontrol udara milik *Kūjō Jieitai*.<sup>89</sup> Unit-unit pesawat udara pemberi peringatan dan pengontrol udara ini memiliki fasilitas radar kontrol dan alat peringatan serangan rudal balistik, dan kemampuan radar yang sudah mereka miliki akan ditingkatkan (perbaikan radar). Di antara 8 grup pemberi peringatan dan 20 squadron pemberi peringatan, ada 7 grup pemberi peringatan dan 4 squadron pemberi peringatan akan dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi dan membawa keluar serangan rudal balistik yang datang menuju Jepang.

3. Memperbesar armada militer angkutan udara;

Sebelum tahun 2015, akan dibangun 2 pesawat terbang dengan tonasi 40.000 ton setiap pesawatnya. Pesawat ini mampu mengakomodasi pesawat pemberi peringatan dan pesawat tempur E-2C. Selain itu, Jepang membangun *Kūjō Jieitai* untuk memiliki kemampuan ofensif jangka panjang. *Kūjō Jieitai* memiliki 40 pesawat tempur F-2. Tahun 2010, jumlahnya akan meningkat lagi menjadi 140, dengan 210 pesawat F-15, 4 pesawat pemberi peringatan S-767 and 12 tanker pengisi bahan bakar di udara.

4. Membentuk pasukan reaksi cepat (*rapid deployment force*)

*Rapid Deployment Force* atau Pasukan Reaksi Cepat dibentuk dengan kerja sama antara *Kūjō Jieitai* dengan *Kaijō Jieitai* sebagai pasukan yang siap bergerak cepat untuk mengantisipasi berbagai situasi berbahaya, termasuk bila ada serangan dari negara lain baik berupa

---

<sup>89</sup> Japan Defense Agency. *2005 Defense of Japan* (Japan: Urban Connections, 2005), hlm 132

serangan rudal balistik maupun serangan di wilayah kelautan terkait kepentingan militer, politis, maupun energi. Langkah ini merupakan salah satu bentuk penguatan aliansi keamanan antara Amerika Serikat dengan Jepang.<sup>90</sup>

5. Meningkatkan kemampuan (*up-grade*) sistem AEGIS angkatan laut.

Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Pertahanan Jepang, Tsutomu Kawara pada bulan Mei 2001, *Kaijō Jieitai* dipersenjatai dengan 4 unit penghancur misil yang terbaik di dunia. Selain itu, pada tahun 2010 *Kaijō Jieitai* akan memiliki 30 unit penghancur besar dengan tonasi di atas 4000 ton dan 14 kapal selam jumbo konvensional dengan tonasi 2700 ton.

Dalam Defense of Japan 2005 disebutkan bahwa kapal perusak dengan sistem AEGIS bagi *Kaijō Jieitai*, yang juga dapat digunakan untuk BMD ( *Ballistic Missile Defense* ) atau pertahanan misil balistik yang merupakan perlengkapan utama untuk mencegah rudal balistik yang menyerang Jepang, dan kemampuan dari 4 kapal perusak dengan sistem AEGIS akan ditingkatkan.

**4.3 Peran *Jieitai* dalam Menjaga Pasokan Minyak di beberapa *Choke Points* Kawasan Asia Pasifik dan SLOC (*Sea Lanes of Communication*)**

Dalam menjaga pasokan keamanan energi minyak Jepang, *Jieitai* membantu menjaga SLOC (*Sea Lanes of Communication*) atau jalur laut internasional dan beberapa tempat strategis yang rawan konflik militer terkait keamanan energi di kawasan Asia Pasifik, yang sering disebut sebagai *choke points*. Seperti yang disebutkan dalam Defense of Japan 2005, ada beberapa *choke points* yang dianggap sangat penting bagi Jepang sebagai jalur masuknya minyak. Beberapa di antaranya adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Kepulauan Spratly, dan Terusan Bashi.

Pentingnya penjagaan *choke points* maupun SLOC oleh *Jieitai* karena di setiap SLOC dan *choke points* memiliki kemungkinan terjadinya sesuatu hal yang dapat membahayakan dan mengganggu keamanan energi, seperti bencana

<sup>90</sup> [www.japantimes.co.jp](http://www.japantimes.co.jp) dalam *Paving Toward Preparedness SDF rising to challenge of modern realities* ( 29 Juni 2004 ) oleh Paul Thompson. Diakses pada tanggal 25 Mei 2008 pukul 16.43.

lingkungan laut akibat kecelakaan kapal-kapal tanker, tumpahnya muatan minyak serta gas alam cair, perang, aksi perompakan (*piracy*), perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal (*armed robbery against ships*), dan pemblokiran. Sesuatu kejadian yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas laut atau penutupan SLOC maupun *choke points* akan menyebabkan gangguan pada pasokan minyak, dan kerugian secara ekonomis. Selain itu, penggunaan jalur pelayaran alternatif yang lebih jauh akan meningkatkan biaya perkapalan, biaya asuransi dan biaya-biaya lain secara signifikan.

#### **4.3.1 Peran Jieitai di Kepulauan Spratly**

Kepulauan Spratly berlokasi di bagian pusat Laut Cina Selatan dan terdiri dari beberapa pantai berkarang. Selain kaya akan sumber daya ikan, Kepulauan ini memiliki sumber daya laut seperti minyak dan gas alam. Terletak pada posisi yang strategis, Spratly menjadi salah satu jalur lalu lintas kemaritiman yang penting. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Cina, Taiwan, dan Vietnam mengklaim keseluruhan Kepulauan Spratly, sedangkan Filipina, Malaysia, dan Brunei mengklaim sebagian Kepulauan Spratly.

Pada tahun 1988, angkatan laut Cina dan Vietnam terlibat perselisihan akan hak atas Kepulauan Spratly. Strategi yang dilakukan Cina seperti pembuatan Hukum Perairan Teritorial 1992, pembangunan bangunan di batu karang Mischief (*Mischief Reef*) pada tahun 1995, dan perpanjangan pekerjaan pembangunan di *Mischief Reef* memperburuk situasi, dan membuat perlawanan keras dari negara-negara lain yang terlibat. Selain itu, banyaknya pendapat berbeda di antara negara anggota ASEAN dalam mengatasi perebutan wilayah ini membuat masalah ini menjadi semakin kompleks, contohnya protes Filipina sebagai bentuk perlawanan terhadap pembangunan bangunan baru di Kepulauan Spratly oleh Malaysia

Desakan berbagai negara untuk melakukan negosiasi bilateral serta penandatanganan kerja sama untuk menemukan solusi damai atas perselisihan yang terjadi di antara negara-negara yang terlibat semakin banyak. Kemudian diadakan pertemuan ARF (*ASEAN Regional Forum*) atau Forum Regional ASEAN setiap tahun dengan para anggota ASEAN untuk membuat konsep tentang Pengurusan Kode Regional di Laut Cina Selatan termasuk larangan

pendudukan batu karang. Selain itu, pertemuan Cina dengan ASEAN pada bulan November 2002 menghasilkan penandatanganan Deklarasi Pengurusan Kelompok di Laut Cina Selatan untuk membantu penyelesaian perdamaian atas masalah-masalah teritorial. Selain itu, Cina juga bekerja sama dengan Filipina dalam survey ladang minyak di laut sekitar Kepulauan Spratly pada bulan September 2004. Pada bulan Maret 2005, Cina, Filipina dan Vietnam setuju untuk pembangunan pengurusan sumber daya alam dipisahkan dari masalah-masalah teritorial di Laut Cina Selatan. Hal ini berarti aktivitas untuk pengurusan pembangunan sumber daya alam dipisahkan dari masalah-masalah teritorial.

Sebenarnya masalah perebutan Kepulauan Spratly yang dapat mengganggu masuknya pasokan energi minyak ke Jepang dapat terselesaikan tanpa adanya konflik militer atau pasukan bersenjata, namun mengingat Cina dengan modernisasi militernya berpotensi melakukan strategi yang dapat merugikan Jepang, dan menyebabkan putusnya suplai minyak akibat terblokadanya Kepulauan Spratly.

Oleh karena itu, Jepang berjaga-jaga dengan melakukan peningkatan kemampuan *Jieitai* khususnya *Kaijō Jieitai* dan *Kūjō Jieitai* seperti yang dilakukan dalam mengantisipasi ancaman Cina dalam menjaga keamanan energi.<sup>91</sup>

#### 4.3.2 Peran Jieitai di Selat Malaka dan Selat Singapura

Selat Malaka merupakan wilayah perairan yang sebagian besar terbentang antara Indonesia dan Malaysia, memanjang antara Laut Andaman di barat laut dan Selat Singapura di tenggara sejauh kurang lebih 520 mil laut dengan lebar yang bervariasi sekitar 11 hingga 200 mil laut.<sup>92</sup> Sedangkan Selat Singapura yang terapat antara Indonesia dan Singapura terbentang menurut arah Barat hingga Timur sejauh 30 mil laut dengan lebar sekitar 10 mil laut. Daerah yang tersempit

<sup>91</sup> [http://www.mod.go.jp/e/publications/defense1996/chapter1/section3/5\\_2.htm](http://www.mod.go.jp/e/publications/defense1996/chapter1/section3/5_2.htm) diakses pada tanggal 27 April 2008 pukul 14.21

<sup>92</sup> Hamzah Ahmad. *The Straits of Malacca* (Malaysia: Maritime Institute of Malaysia, 1997), hlm. 4

dari jalur ini adalah Phillips Channel yang berada di Selat Singapura, yaitu hanya mempunyai lebar 1.5 mil laut.<sup>93</sup>

Kedua Selat ini merupakan jalur laut utama yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Cina. Jalur ini juga merupakan rute terpendek untuk kapal-kapal perdagangan yang mengangkut minyak dari Teluk Persia menuju negara-negara Asia Timur. Hal ini menyebabkan Selat Malaka dan Selat Singapura, sebagai satu kesatuan, menjadi jalur yang padat, dan mempunyai arti sangat strategis bagi pelayaran internasional.

Lebih dari seperempat perdagangan dunia dan separuh dari perdagangan minyak serta LNG menggunakan perlintasan Selat Malaka dan Selat Singapura. Perlintasan minyak di Selat Malaka mencapai tiga kali lebih besar dibandingkan dengan yang melintasi Terusan Suez, dan lima belas kali lebih besar dari pada perlintasan minyak melalui Terusan Panama. Apabila dibandingkan dengan Selat Hormuz yang memisahkan Laut Arab dengan Samudera Hindia, Selat Malaka dan Selat Singapura keduanya mempunyai nilai strategis yang hampir sama, yaitu merupakan jalur perdagangan energi dunia.<sup>94</sup>

Bagi negara-negara pengguna selat, Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan *lifeline* (garis kehidupan) yang menopang perekonomian negaranya, antara lain Jepang, Korea Selatan dan China. Sejumlah 80% pasokan minyak Jepang dan China diangkut melalui jalur Selat Malaka.<sup>95</sup> Sebanyak 50.000 kapal ukuran besar menggunakan jalur ini setiap tahun, membawa 25% barang perdagangan dunia, 2/3 dari LNG (*Liquid Natural Gas*) dunia, dan jalur minyak 11 juta barrel perhari serta 14% kebutuhan sehari-hari dunia.<sup>96</sup>

Bagi Jepang sendiri, Selat Malaka adalah rute jalur pembawa minyak terhemat dari Teluk Persia. Berdasarkan sebuah studi, industri perminyakan Jepang dapat menghemat 340 juta dolar Amerika dalam setahun dengan mengimpor minyak melalui Selat Malaka daripada melewati Selat Lombok dan

<sup>93</sup> *ibid*

<sup>94</sup> [http://www.kbrisingapura.com/docs/Buku\\_Piracy/Isi\\_buku.pdf](http://www.kbrisingapura.com/docs/Buku_Piracy/Isi_buku.pdf), diakses pada tanggal 10 Mei 2008 pukul 15.03. Penulis adalah Lembaga KBRI Singapura.

<sup>95</sup> Mary Ann Palma. *Legal and Political Responses to Maritime Security Challenges in the Straits of Malacca and Singapore* ( Filipina : Institute of International Legal Studies University of the Philippines Law Center, 2003)

<sup>96</sup> Michael Richardson & P. Mukundan. "Political and Security Outlook 2004: Maritime Terrorism and Piracy" dalam *Trends in Southeast Asia Series*: 3, 2004.

Selat Makassar.<sup>97</sup> Begitu pun dalam pengiriman barang ke Jepang, industri Jepang dapat menghemat 1 juta dolar Amerika per tahunnya dengan menggunakan Selat Malaka untuk perdagangan barang Jepang.

Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura yang memiliki nilai startegis ekonomis ini dipengaruhi angin kencang dari arah Sumatera, banyaknya terusan dangkal, dan gelombang pasang surut yang dapat menenggelamkan kapal sehingga memungkinkan terjadinya tubrukan antarkapal, kecelakaan, dan berakhir pada pemblokiran. Selama 7 bulan dalam periode tahun 1992-1993, ada 5 peristiwa tubrukan besar di Selat Malaka, 3 di antaranya melibatkan 3 tanker besar pengangkut minyak, dan 2 dari peristiwa itu menyebabkan peristiwa tumpahnya minyak secara besar-besaran.<sup>98</sup> Berdasarkan data lain, menurut laporan dari Departemen Kelautan Malaysia antara tahun 1975 hingga 1993 ada 75 peristiwa kecelakaan kapal yang tercatat di Selat Malaka. 34 dari jumlah kecelakaan tersebut mengakibatkan peristiwa tumpahnya minyak, 3 di antaranya (kapal Showa Maru, Diego Silang, dan Nagasaki Spirit) menyebabkan peristiwa tumpahnya minyak yang paling banyak.<sup>99</sup> Selain kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi, Selat Malaka juga sering dijadikan sebagai tempat membuang sampah, lumpur, dan limbah lainnya.

Selat Malaka dan Selat Singapura juga sering menjadi langganan kejahatan, seperti aksi perompakan (*piracy*), dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal (*armed robbery against ships*). Berdasarkan data IMB<sup>100</sup> (*International Maritime Bureau*) hampir setengah dari aksi kejahatan di seluruh dunia yang dilaporkan adalah terjadi di Selat Malaka dan jumlah laporan tersebut meningkat dari 170 kejadian pada tahun 2002 menjadi 189 kejadian pada tahun 2003.<sup>101</sup>

<sup>97</sup> Hisayoshi Morisugi, J.B Marsh, Nobuharu Miyatake. *Economic Value of the Malacca Strait* (New York: Taylor and Francis, 1992), hlm 24

<sup>98</sup> Gerard J. Mangone. *Navigation in the Strait of Malacca* (The Netherlands: Alphen aan den Rijn, 1996), hlm. 37

<sup>99</sup> Hamzah Ahmad. *op.cit.*, hlm. 11

<sup>100</sup>IMB (*International Maritime Bureau*) adalah sebuah badan khusus milik Badan Perdagangan Internasional yang memerangi kejahatan dalam perdagangan di laut terutama yang terkait masalah perompakan dan penipuan, serta melindungi awak-awak kapal.

<sup>101</sup> International Chamber Commerce-IMB, *Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report 2003 dan Report 1 January 2004-30 Juni 2004*

Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan beberapa negara besar seperti halnya Amerika Serikat, Jepang, dan Cina berusaha mengambil langkah untuk mengontrol jalan laut internasional ini. Pada tahun 2004, Amerika Serikat mengajukan sebuah proposal, *the Regional Maritime Security Initiative* (RMSI)<sup>102</sup>, yang ditujukan pada negara-negara pesisir sekitar Selat Malaka, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia supaya mengizinkan angkatan laut Amerika Serikat berpatroli melawan perompakan dan terorisme. Setelah sebelumnya dibuat *the Cargo Security Initiative* (CSI)<sup>103</sup> pada tahun 2001, dan *the Proliferation Security Initiative* (PSI)<sup>104</sup> pada tahun 2003, yang keduanya memasukkan Selat Malaka dalam pengawalan transportasi persenjataan penghancur massal, dan melayani keamanan perairan internasional.<sup>105</sup>

Pada bulan November 2004, Jepang mengajukan sebuah mekanisme keamanan untuk memajukan kerja sama anti-perompakan (*anti-piracy*) dan anti perampokan kelautan (*anti-maritime robbery*) yang sering disebut ReCAAP<sup>106</sup> (*Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia*), yang bertujuan meminta negara-negara pesisir Selat Malaka mengizinkan kehadiran *Jeitai* (Pasukan Bela Diri Jepang).<sup>107</sup> Ada 16 negara berpartisipasi dalam negosiasi dan persetujuan perjanjian ini (Jepang, Cina, Korea Selatan, India, Bangladesh, Srilangka, dan 10 negara Asia lainnya). Secara umum, proposal perjanjian yang diusulkan oleh Perdana Menteri Junichiro

<sup>102</sup> RMSI (*Regional Maritime Security Initiative*) adalah sebuah proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait masalah keamanan di laut seperti terorisme dan aksi kejahatan lainnya. Tujuan RMSI adalah membangun kerja sama antar negara-negara dan menanggulangi ancaman-ancaman maritim di bawah hukum internasional.

<sup>103</sup> CSI (*Cargo/Container Security Initiative*) adalah sebuah prakarsa keamanan dari Amerika Serikat pada tahun 2002 untuk meningkatkan keamanan bagi kapal-kapal kargo/container yang menuju Amerika Serikat.

<sup>104</sup> PSI (*Proliferation Security Initiative*) adalah usaha internasional yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mencegah pengiriman teknologi senjata. PSI bertujuan untuk melawan pertumbuhan senjata biologi, kimia, dan nuklir.

<sup>105</sup> Xuegang, Zhang. 2007.op.cit, hlm. 19

<sup>106</sup> ReCAAP (*Regional Cooperation Agreement on combating piracy and Armed Robbery against Ships in Asia*) yang diusulkan bulan Oktober 2001 oleh Perdana Menteri Junichiro Koizumi dan diselesaikan pada November 2004 adalah mekanisme kerja sama multilateral di antara 16 negara (10 negara ASEAN, Japan, Cina, Korea Selatan, India, Sri Lanka dan Bangladesh) demi memerangi perompakan laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal di wilayah Asia.

<sup>107</sup> Yoichiro Sato. *Southeast Asian Receptiveness to Japanese maritime Security Cooperation* (Asia-Pacific Center for Security Studies: United States Departement of Defense, 2007), hlm. 3

Koizumi ini ditolak oleh negara-negara Asia Tenggara karena pengalaman masa lalu mengingat sejarah Jepang terhadap Cina dan Korea Selatan.

Sebenarnya Indonesia melihat kemungkinan kerja sama yang lebih dekat dengan *Kaijō Jieitai* untuk menyeimbangkan kekuatan angkatan laut India dan angkatan laut Cina. Selain itu, Indonesia juga bermaksud melakukan kerja sama bilateral dengan Jepang tidak hanya di Selat Malaka, tetapi juga di Selat Lombok dan Selat Makassar, mengingat kedua selat tersebut adalah jalur alternatif bagi pasokan minyak Jepang bila terjadi pemblokiran di Selat Malaka.<sup>108</sup>

Terkait dengan keamanan energi Jepang di Selat Malaka, Jepang juga pernah menjadi korban aksi perompakan. Pada bulan Maret 2005, sebuah kapal pengangkut minyak milik Jepang diserang dan 3 kru, termasuk 2 orang Jepang di antaranya menjadi korban penculikan.<sup>109</sup> Keamanan maritim di Selat ini sekarang menjadi perhatian publik Jepang.

Dalam merespon permasalahan ini, Jepang memberikan bantuan berupa 4 unit helikopter jenis UH-60 J milik *Kūjō Jieitai*.<sup>110</sup> Walaupun pengajuan proposal ReCAAP ditolak, bantuan *Kūjō Jieitai* merupakan salah satu peran *Jieitai* dalam mendukung kegiatan perdamaian dan keamanan internasional. Helikopter yang dilengkapi dengan bantuan kesehatan ini dipergunakan untuk kemudian hari bila terjadi hal-hal yang merugikan pengangkutan kapal bermuatan minyak menuju Jepang.

---

<sup>108</sup> Ibid., hlm 5

<sup>109</sup> Japan Defense Agency. 2005 *Defense of Japan* ( Japan: Urban Connections, 2005), hlm 73

<sup>110</sup> ibid

## 5. KESIMPULAN

Energi minyak bumi merupakan faktor fundamental bagi Jepang sebagai negara industri. Dengan memiliki banyak populasi penduduk dan menempati posisi ketiga dalam GNP dunia, Jepang sangat bergantung pada impor energi minyak dari negara-negara di kawasan Teluk Persia. Kendala-kendala dalam mendapatkan minyak bumi yang harus dihadapi oleh Jepang adalah harga minyak bumi yang terus membumbung tinggi di pasaran dunia dan kelangkaan pasokan minyak akibat terbatasnya sumber daya energi minyak.

Di lain pihak, impor minyak Jepang dibawa dari Teluk Persia melalui SLOC (*Sea Lanes of Communication*) dan berhenti di tempat-tempat strategis yang disebut dengan *choke points*, seperti Selat Malaka dan Kepulauan Spratly. Namun, *choke points* tersebut memiliki potensi gangguan pasokan minyak, akibat terjadinya konflik “sumber daya energi” dengan Cina, tubrukan kapal-kapal tanker yang mengakibatkan tumpahnya muatan minyak, perang, aksi perompakan (*piracy*), perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal (*armed robbery against ships*), dan berujung pada pemblokiran. Hal ini membuat Jepang melakukan strategi untuk mendapatkan dan mengamankan jaminan pasokan minyak.

Pengamanan pasokan energi minyak dilakukan oleh Jepang demi menjamin kebutuhan kehidupan masyarakat Jepang sehari-hari. Hal ini melahirkan suatu konsep keamanan energi Jepang yang harus dilakukan secara seimbang antara *Energy Security* (pengamanan energi) dengan *Environmental Protection* (perlindungan lingkungan) dalam rangka meningkatkan *Economic Growth* (pertumbuhan ekonomi) Jepang .

Strategi militer yang dilakukan Jepang merupakan bentuk *Environmental Protection* (perlindungan lingkungan) untuk melindungi keamanannya.

Strategi militer yang dilakukan Jepang wajar dilakukan mengingat ada kemungkinan potensi konflik dengan Cina yang melakukan tindakan serupa untuk menjaga keamanan energinya dengan melakukan modernisasi militer. Selain itu strategi militer juga dilakukan untuk melindungi SLOC maupun *choke points* dari kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan terputusnya suplai minyak Jepang. Strategi militer yang Jepang ambil untuk melindungi keamanan energinya adalah dengan terus meningkatkan kekuatan *Jieitai* (Pasukan Bela Diri), dan memberdayakan kemampuannya.

Dari analisis kepustakaan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Jepang meningkatkan kemampuan *Jieitai* khususnya *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut) dan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara) dalam menjaga pasokan minyak Jepang mengingat kemungkinan potensi konflik militer dengan Cina terkait masalah keamanan energi. *Jieitai* juga berperan penting dalam menjaga dan mengawasi pasokan minyak yang melewati SLOC (*Sea Lanes of Communication*) atau jalur laut internasional maupun beberapa *choke points* penting di kawasan Asia Pasifik, seperti Kepulauan Spratly, Selat Singapura, dan Selat Malaka. *Choke points* tersebut membutuhkan penjagaan dan pengawasan *Jieitai* karena memiliki nilai strategis ekonomis, namun sangat rawan dengan terjadinya bencana lingkungan laut, perang, aksi perompakan (*piracy*), perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal (*armed robbery against ships*), dan pemblokiran.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Hamzah. 1997. *The Straits of Malacca*. Maritime Institute of Malaysia: Malaysia.
- Bohi, Douglas R. & Toman, Michael A. 1996. *The Economics of Energy Security*. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht.
- Brown, Michael E. 2000. *The Rise of China*. The MIT Press: London.
- Buck, James. 1975. *The Japanese Military System*. Sage Publications: London.
- Cottreel, Fred. 1955. *Energy and Society: The relation between energy, social change and economic development*. Mccgraw- Hill: New York.
- Chinen, Mark A. 2006. *Article 9 of The Constitutional of Japan and The Use of Procedural and Substantive Heuristics for Concensus*. Seattle University School of Law: Seattle.
- Chinworth, Michael. 1992. *Inside Japan's Defense, Technology, Economics and Strategy*. Brassey's Inc: New York.
- Deese, David A & Nye, Joseph.S. 1981. *Energy and Security*. Ballinger Publishing Company: Cambridge.
- Drifte, Richard. 1989. *Arms Production in Japan*. Westview Press: Colorado.
- Foro, Matsu. 1983. *Self Defense Forces* (Encyclopedia of Japan). Kodansha Ltd: Japan.
- Fukami, Hiroaki. "The Restructuring of Energy Security and A Review of The Energy Security Policy Base". Kokusai Mondai, Japan: International Affairs, November, 1999, hal 2-24.
- Hashimoto, Kohei. 2000. *Japanese Energy Security and Changing Global Energy Market*. Institute for Public Policy: United States.
- Hirasawa, Kasuhige. 1992. *Japan's Tilting Neutrality* ( J.C Hurewite Oil).United States.
- IEA (International Energy Agency) extended energy balances 2006.
- International Chamber of Commerce-IMB (International Maritime Bureau). *Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report 20003 dan report 1 Januari 2004-30 Juni 2004*.

- Jabeen, Mussarrat. 2006. *South Asia and Management of Energy Security*. Institute of Regional Studies Islamabad: Baghdad.
- Japan Defense Agency. 2001. *2001 Defense of Japan*. Urban Connections: Japan.
- Japan Defense Agency. 2002. *2002 Defense of Japan*. Urban Connections: Japan.
- Japan Defense Agency. 2003. *2003 Defense of Japan*. Urban Connections: Japan.
- Japan Defense Agency. 2005. *2005 Defense of Japan*. Urban Connections: Japan
- Japan's National Defense Program Guideline, FY 2005
- Japan's Mid-Term Defense Program, FY 2005-FY2009 Outline
- Joseph, David A. Deese S Nye. 1981. *Energy and Security*. Ballinger Publishing Company: Cambridge.
- Kenji, Isezaki. 2008. *Jieitai no Kokusai Kōken wa Kenpō Kyūjyō de Kokuren Heiwa Ijigun o Tōkatsushita Otoko no Ketsuron*. Tokyo: Kamogawa.
- Klare, Michael T. 2001. *Resource Wars: the New Landscape of Global Conflict*. Owl Books: New York.
- Kohl, Wilfrid L. 1982. *After the second oil crisis*. Lexington Books: Massachusetts
- Leifer, Michael. 1978. *International Straits of the World*. Alphen aan den Rijn: The Netherlands.
- Lembaga KBRI Singapura. *Buku Piracy*. Mei 10, 2008.  
[http://www.kbrisingapura.com/docs/Buku\\_Piracy/Isi\\_buku.pdf](http://www.kbrisingapura.com/docs/Buku_Piracy/Isi_buku.pdf)
- Li, Nan. "From Revolutionary Internationalism to Conservative Nationalism: The Chinese Military's Discourse on National Security and Identity in the Post-Mao Era", (*United States Institute of Peace*, Peaceworks no. 39, Mei 2001)
- Lim, Hua Sing. 2001. *Peranan Jepang di Asia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Mangone, Gerard J. 1996. *Navigation in the Strait of Malacca*. Alphen aan den Rijn: The Netherlands.
- Minister of Defense. *Defense 1996*. April 27, 2008.  
[http://www.mod.go.jp/e/publications/defense1996/chapter1/section3/5\\_2.htm](http://www.mod.go.jp/e/publications/defense1996/chapter1/section3/5_2.htm)
- Morisugi, Hisayoshi & Miyatake, Nobuharu. 1992. *Economic Value of the Malacca Strait*. Taylor and Francis: New York.

- Morse, Ronald A. 1988. *Japanese Energy Policy*. Ballinger Publishing Company: Cambridge.
- Nester, William. 1992. *Japan and the Third World: Pattern, Power, Prospects*. Macmillan: London.
- News. Editorial. *Minyak di Perairan Sengketa*. Juni 14, 2008.  
<http://www.korantempo.com/news/2005/4/11/internasional/40.html>
- Ono, Akio. 1997. *Japan's Contribution to Safety and Pollution Mitigation in the Straits of Malacca*. International Cooperation in Trade, Funding and Navigational Safety: Japan.
- Okazaki, Hizahiko. 1986. *A Grand Strategy for Japanese Defense*. University Press of America: United States.
- Richardson, Michael & P. Mukundan. 2004. Political and Security Outlook 2004: Maritime Terrorism and Piracy. *Trends in outeast Asia Series*: 3.
- Rustam, Ferry. 1996. *Laporan Penelitian: Hubungan Dinamika Eksternal dengan Pertahanan Jepang setelah Perang*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia: Jakarta.
- Palma, Mary Ann. 2003. *Legal and Political Responses to Maritime Security Challenges in the Straits of Malacca and Singapore*. Institute of International Legal Studies University of the Philippines Law Center: Filipina.
- Sanusi, Bachrawi. 1985. *Minyak bumi mengubah ekonomi dunia, dari Indonesia, OPEC, AS hingga Jepang berkelut dalam energi*. Ind-Hill Co: Jakarta.
- Sato, Yoichiro. 2007. *Southeast Asian Receptiveness to Japanese maritime Security Cooperation*. Asia-Pacific Center for Security Studies: United States Departement of Defense.
- Scalapino, Robert & Sato, Seizaburo. 1990. *Masalah Keamanan Asia*. CSIS: Jakarta.
- Sims, Richard. 2001. *Japanese Political History Since The Meiji Restoration 1868-2000*. London.
- SIPRI Yearbook 2005. 2005. *Armament, Disarmament and International Security*, Stocholm International Peace Research Institute: London.
- Tellis, Ashley J. & Michael Wills. 2006. *Strategic Asia 2005-2006, Military Modernization in an Era of Uncertainty*. National Bureau of Asian Research: Washington DC.

*The Military Balance 1997-1998*. International Institute for Strategic Studies (IISS): London.

*The Military Balance 2005-2006*. International Institute for Strategic Studies (IISS): London.

Thompson, Paul. 2004, June 29. *Paving Toward Preparedness SDF Rising to Challenge of Modern Realities* Mei 25, 2008. <http://www.japantimes.co.jp>

Tow, William T. 2001. *Subregional security Cooperation in the Third World*. Boulder Lynne Rienner: United States.

Tun, Hwa Ko & Yu, Ming Shaw. 1983. *Sea Lane Security in The Pacific Basin*. The Asia and World Institute Republic of China: Taiwan.

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*), "Analysis of Ways to Enhance the Contribution of Specific Services Sectors to the Development Perspectives of Developing Countries: Energy Services in International Trade: The strategic value of the Strait of Malacca Mokhzani Zubir 18 Development Implications" Catatan Sekretariat UNCTAD, TD/B/COM.1/46, 10 December 2001. <http://www.unctad.org>

Willrich, Mason. 1978. *Energy and World Politics*. Macmillan Publisher: London.

Wu, Kang & Fesharaki, Fereidun. 2007. *Asia's energy future Regional Dynamics & Global Implications*. East-West Center: Hongkong.

Yamauchi, Toshihiro. 1997. *Constitutional Pacifism: Principle, Reality, and Perspective in FIVE DECADES of CONSTITUTIONALISM Jieitaiho*. Japan.

Zhang, Xuegang. 2007. "Southeast Asia and Energy: Gateway to Stability" dalam *China Security* Vol 3 No.2. World Security Intitute: China.

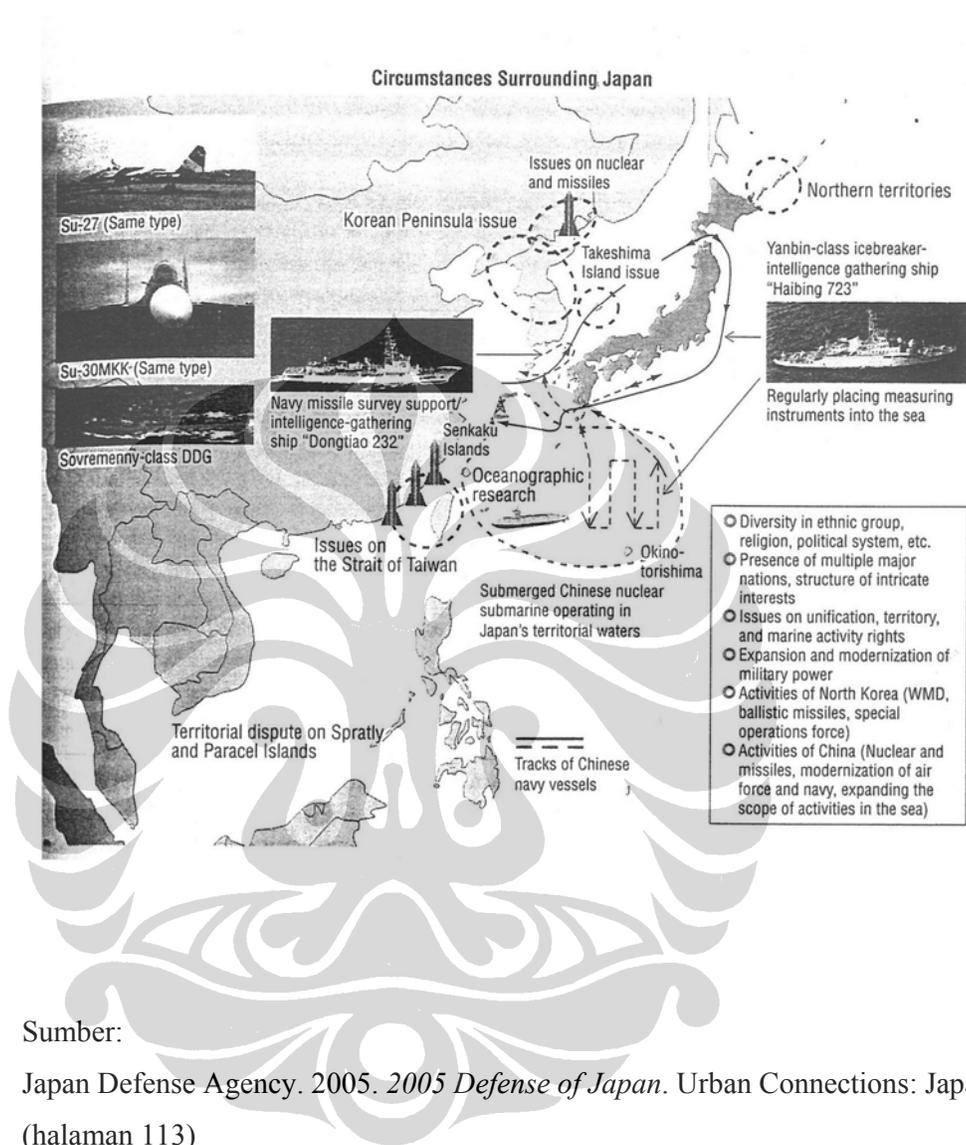
Zubir, Mokhzani. 2004. *The Strategic Value of the Strait of Malacca*. MIMA: Malaysia.

## DAFTAR ISTILAH

<b>Armed robbery against ships</b>	: perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal di dalam yuridiksi suatu negara
<b>Artileri</b>	: pasukan beserta kesenjataannya
<b>b/d</b>	: <i>barrels a day</i> , sekitar 31,5 galon atau 143,12025 liter (1 galon= 4,5435 liter)
<b>Brigade</b>	: unit militer terdiri dari 2-5 resimen / batalion
<b>Divisi</b>	: dua atau lebih <i>brigade</i>
<b>Kapal Perusak manuver kapal seperti</b>	: kapal perang yang mampu bergerak lincah dengan cepat untuk melindungi kapal perang yang lebih besar, tempur/kapal induk dari kapal-kapal yang lebih kecil kapal torpedo, kapal selam, Dan lain-lain
<b>Misil target dan</b>	: suatu senjata (proyektil) yang bergerak sendiri menuju target dan mampu meledak
<b>Pemandu Misil</b>	: pemandu yang memandu misil ke udara
<b>Piracy negara</b>	: perompakan terhadap kapal-kapal di luar yuridiksi suatu negara (laut bebas)
<b>Rudal Balistik balistik</b>	: peluru kendali yang terbang dalam sub orbit melalui jalur balistik (jarak jauh dengan kecepatan tinggi)
<b>Tonasi</b>	: kapasitas ruang muat dalam suatu kapal, diukur dalam ton

## Lampiran 2.

## Keadaan sekitar Jepang

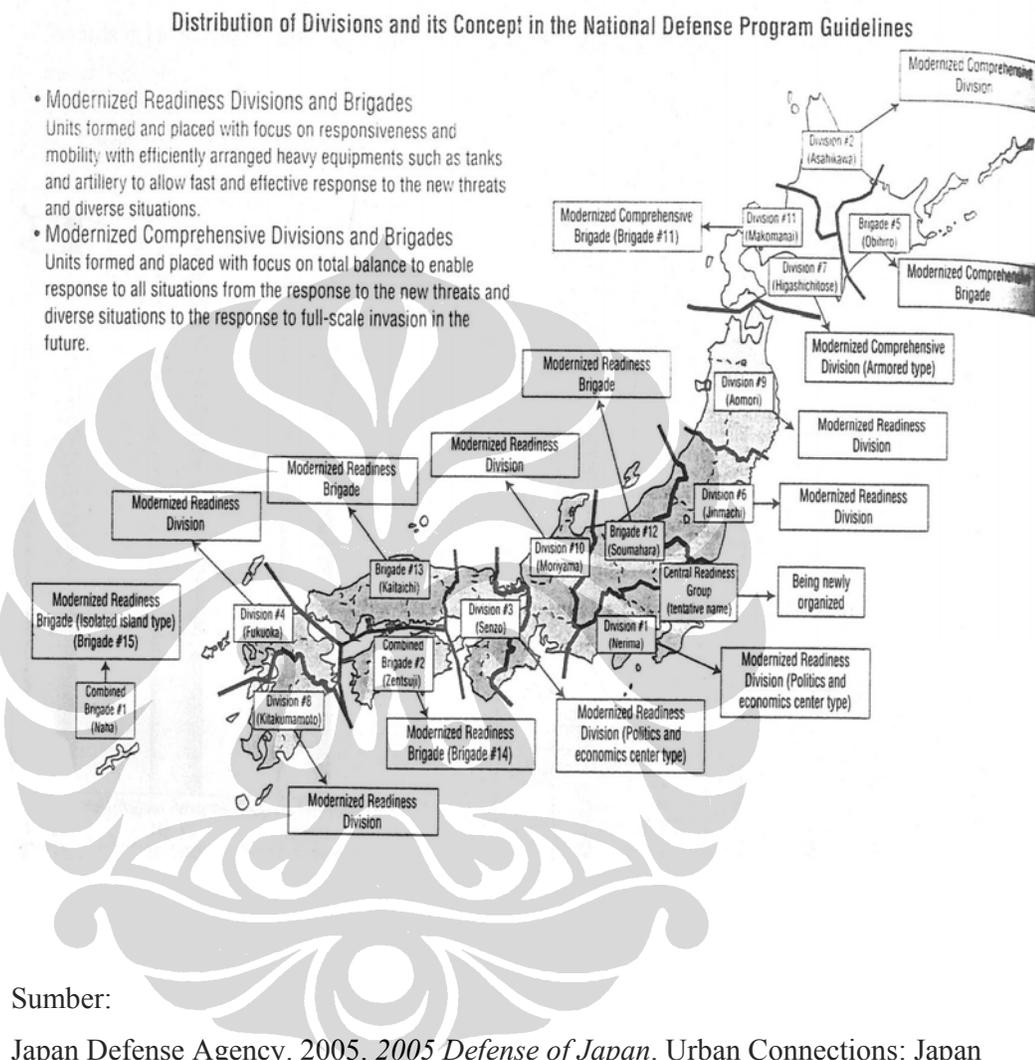


Sumber:

Japan Defense Agency. 2005. *2005 Defense of Japan*. Urban Connections: Japan (halaman 113)

## Lampiran 3.

14 wilayah penempatan 8 divisi dan 6 brigade *Rikujō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Darat)

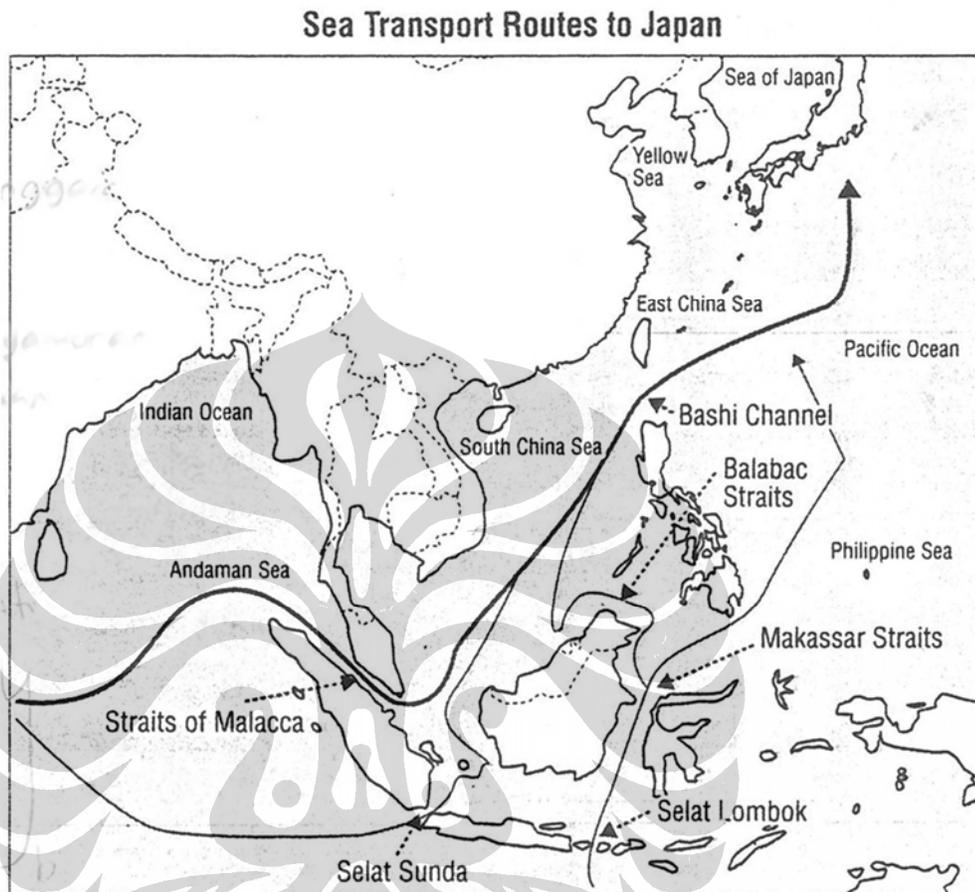


Sumber:

Japan Defense Agency. 2005. *2005 Defense of Japan*. Urban Connections: Japan (halaman 126)

Lampiran 1.

Rute transportasi laut menuju Jepang

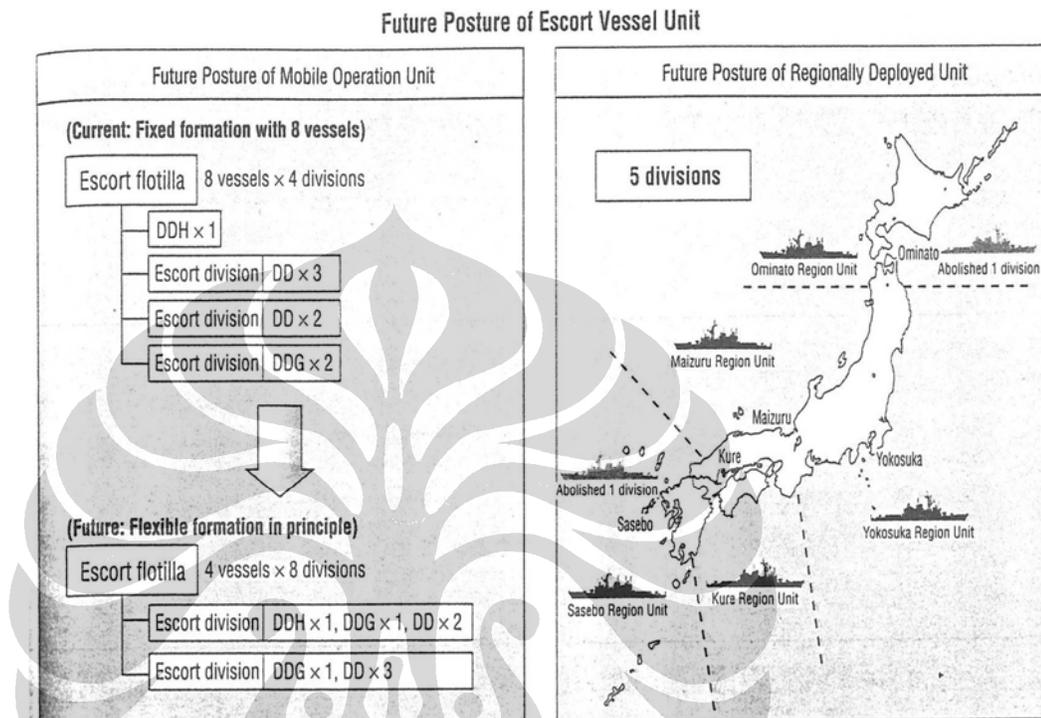


Sumber:

Japan Defense Agency. 2005. *2005 Defense of Japan*. Urban Connections: Japan (halaman 73)

Lampiran 4.

5 divisi pertahanan *Kaijō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Laut)

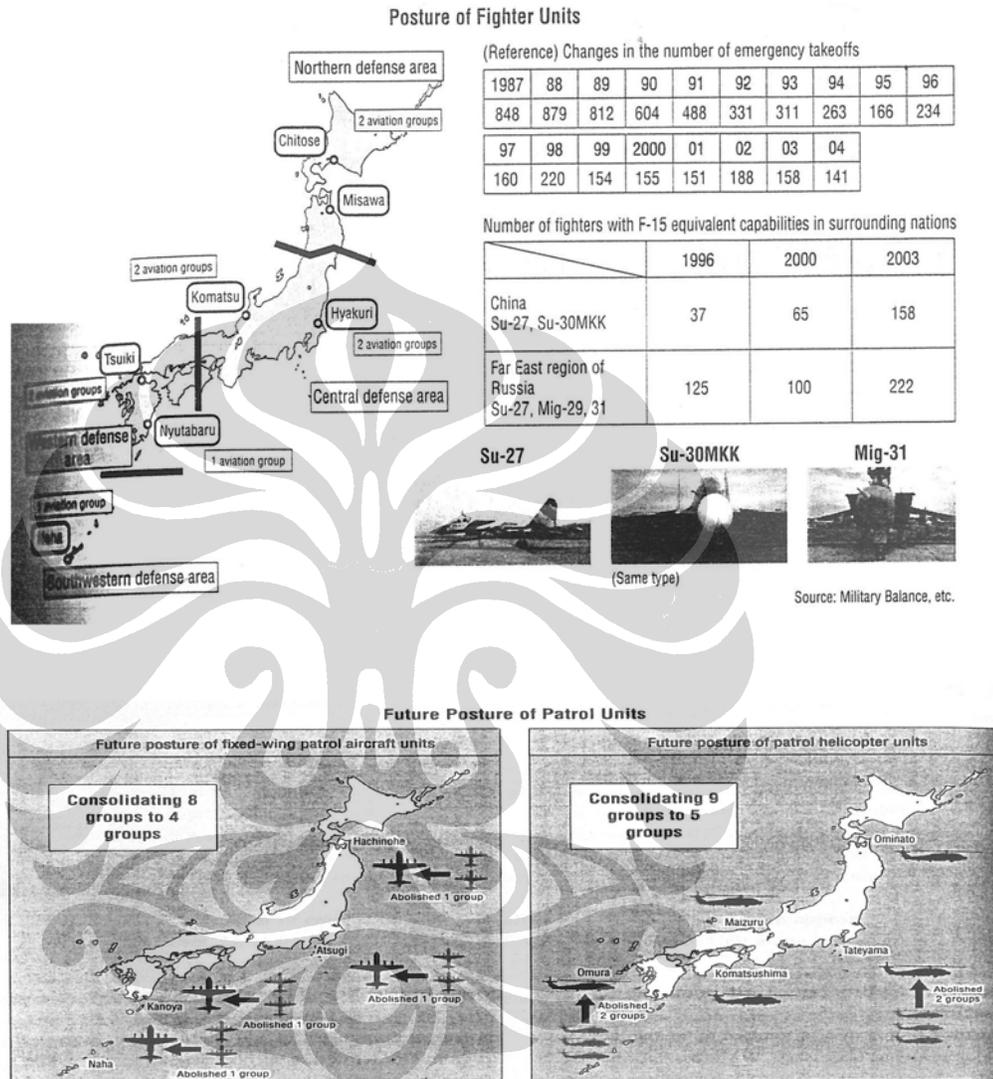


Sumber:

Japan Defense Agency. 2005. *2005 Defense of Japan*. Urban Connections: Japan (halaman 129)

Lampiran 5.

4 wilayah pertahanan *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara)



Sumber:

Japan Defense Agency. 2005. *2005 Defense of Japan*. Urban Connections: Japan (halaman 130-131)

## Lampiran 6.

## Jalur aliran minyak yang menuju Asia

UNCLASSIFIED



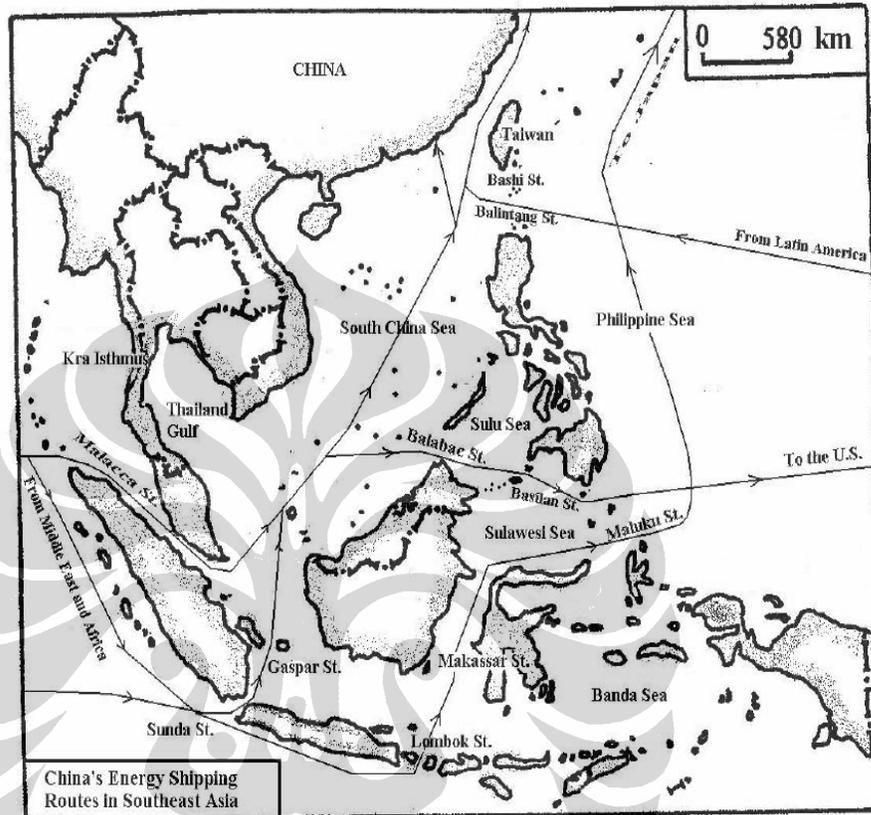
Sumber:

Energy Information Administration 2004

( China and Japan Critical Sea Lanes of Communication )

## Lampiran 7.

## Jalur laut pasokan minyak Cina



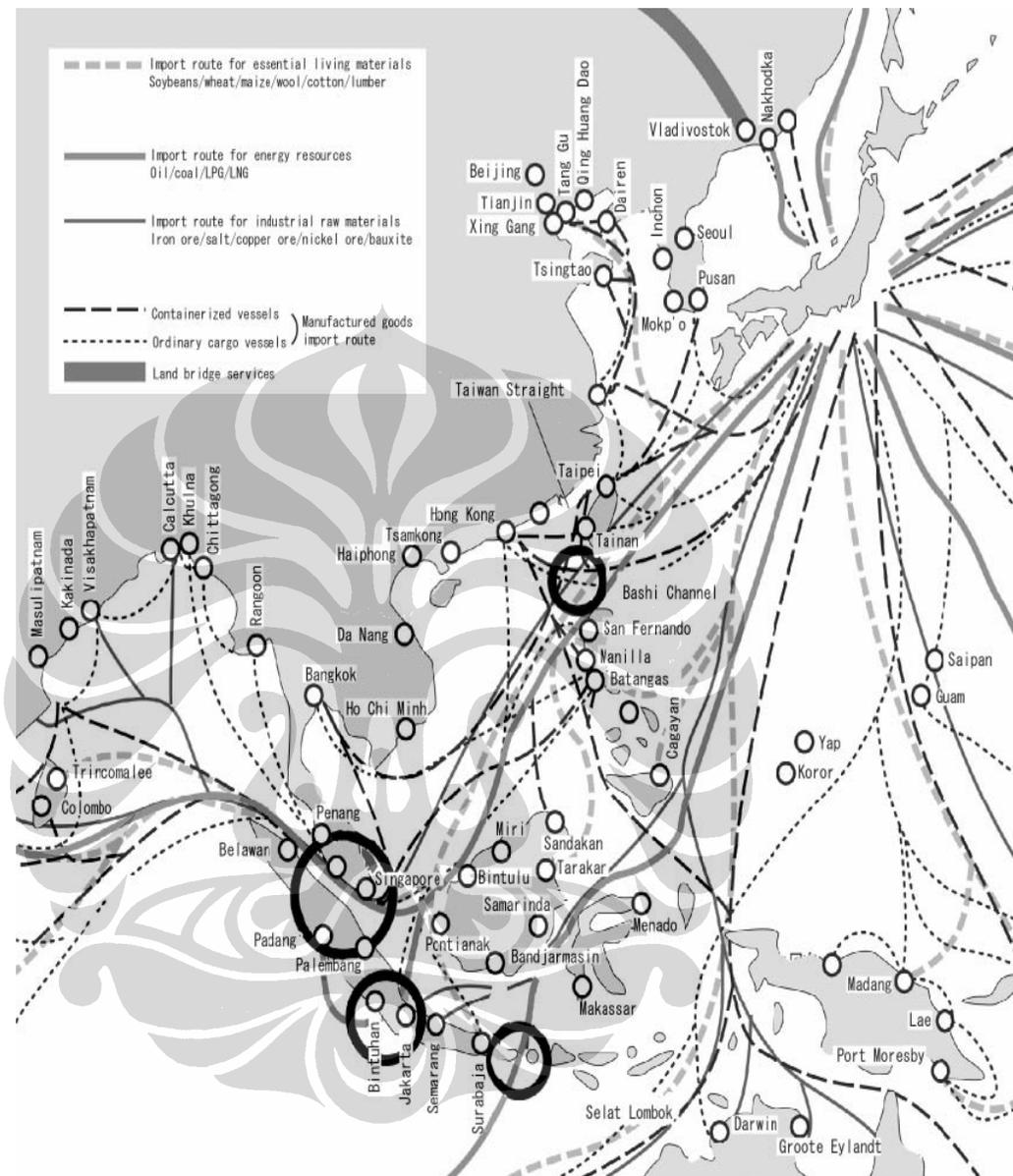
Sumber :

Zhang Xuegang. 2007. "Southeast Asia and Energy: Gateway to Stability" dalam China Security Vol 3 No.2. World Security Intitute: China.

(halaman 3)

## Lampiran 8.

## Jalur laut dan choke points yang penting menurut Jepang di Asia Pasifik



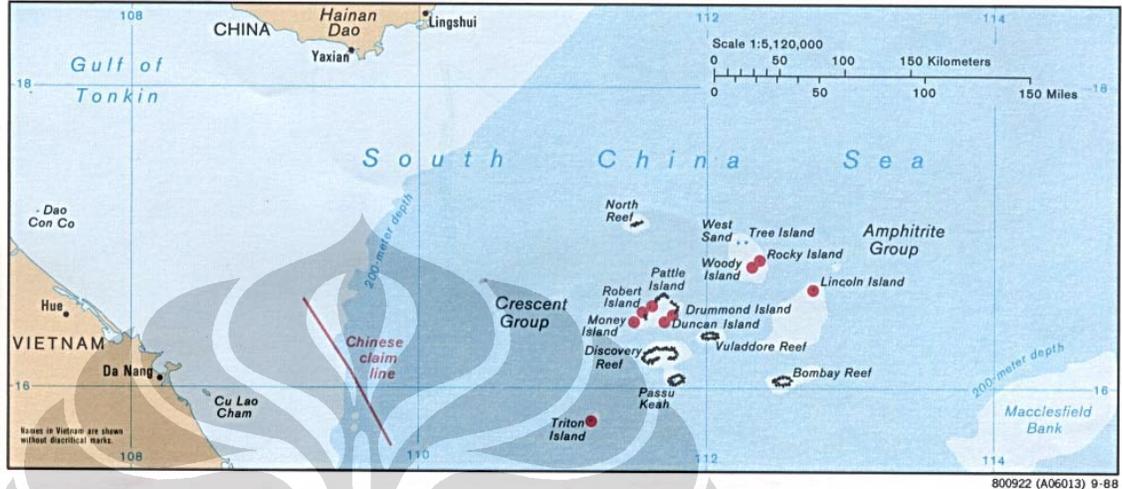
Sumber :

Kohei Hashimoto. 2000. *Japanese Energy Security and Changing Global Energy Market*. Institute for Public Policy: United States. (halaman 8)

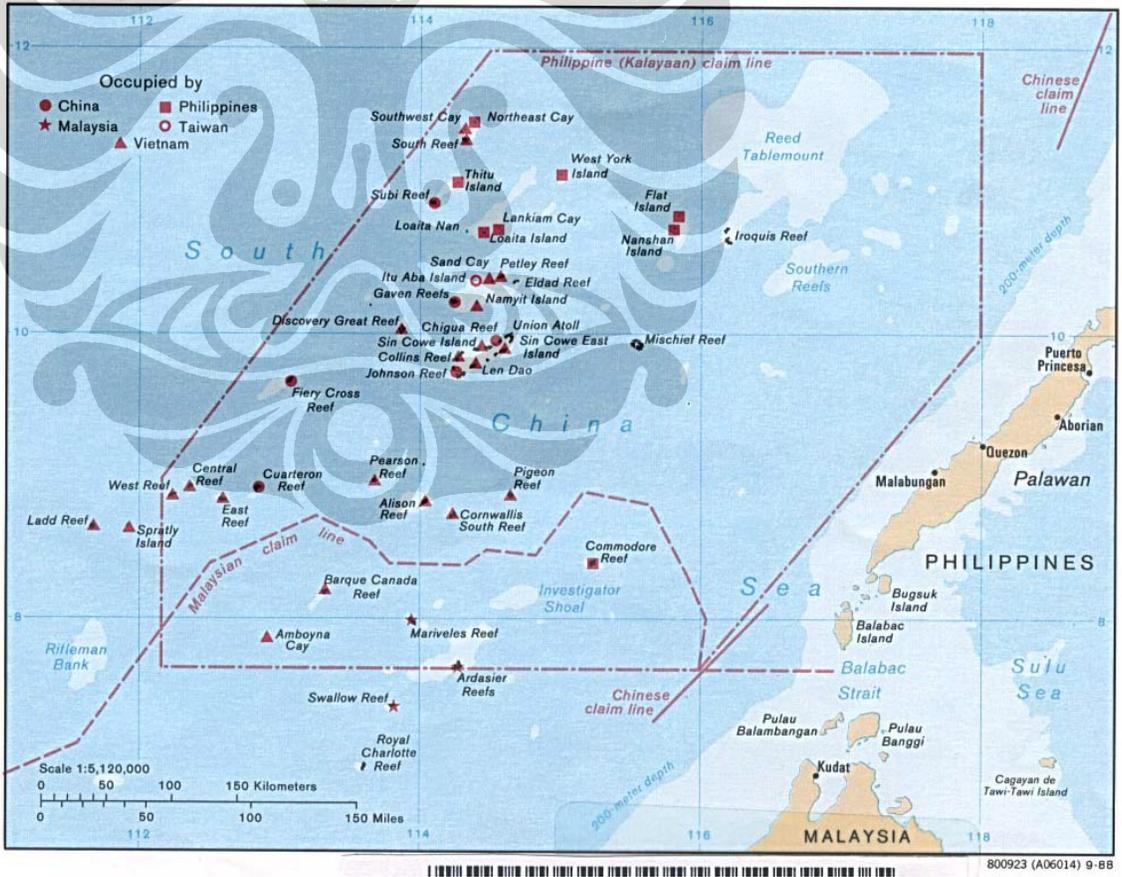
Lampiran 9.

Kepulauan Spratly dan Kepulauan Parcel

The Parcel Islands



The Spratly Islands





Lampiran 11.

Helikopter *Kūjō Jieitai* (Pasukan Bela Diri Udara) yang diperbantukan di Selat Malaka



Sumber :

[http://www.mod.go.jp/asdf/equipment/gallery/wallpaper/05\\_uh60j\\_images/uh60j\\_1\\_800.jpg](http://www.mod.go.jp/asdf/equipment/gallery/wallpaper/05_uh60j_images/uh60j_1_800.jpg)